



EKONOMI PEMBANGUNAN INDONESIA

TEORI, KEBIJAKAN KONTEMPORER, DAN
TANTANGAN STRUKTURAL

Tim Penulis:

Ahmad Maulidizen | Muhammad Astri Yulidar Abbas | Sugeng Susanto
Mogie Demsi Oemar | Akhmad Solikin | Mochamad Heru Riza Chakim
Nurlaila Hanum | Gautama Sastra Waskita
Ahmad Nashiruddin Mushoddiq Rahman | Wiljan Attentia Kotngoran
Muhammad Daffa Z | Ellen D. Oktanti Irianto
Hardjanto Nusantara | Edwin Basmar | Zainal Arifin

EKONOMI PEMBANGUNAN INDONESIA

**Teori, Kebijakan Kontemporer, dan Tantangan
Struktural**

**Ahmad Maulidizen
Muhammad Astri Yulidar Abbas
Sugeng Susanto
Mogie Demsi Oemar
Akhmad Solikin
Mochamad Heru Riza Chakim
Nurlaila Hanum
Gautama Sastra Waskita
Ahmad Nashiruddin Mushoddiq Rahman
Wiljan Atfentia Kotngoran
Muhammad Daffa Z
Ellen D. Oktanti Irianto
Hardjanto Nusantara
Edwin Basmar
Zainal Arifin**

Editor : Muhamad Rizal Kurnia, M.E., C.Ed.

EKONOMI PEMBANGUNAN INDONESIA

Teori, Kebijakan Kontemporer, dan Tantangan
Struktural

Tim Penulis:

Ahmad Maulidizen
Muhammad Astri Yulidar Abbas
Sugeng Susanto
Mogie Demsi Oemar
Akhmad Solikin
Mochamad Heru Riza Chakim
Nurlaila Hanum
Gautama Sastra Waskita
Ahmad Nashiruddin Mushoddiq Rahman
Wiljan Atfentia Kotngoran
Muhammad Daffa Z
Ellen D. Oktanti Irianto
Hardjanto Nusantara
Edwin Basmar
Zainal Arifin

Editor : Muhamad Rizal Kurnia, M.E., C.Ed.
Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Asep Nugraha, S.Hum.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : x, 301
ISBN : 978-634-7522-87-0
Terbit Pada : Agustus 2026
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang – Banten, 42195
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku "**EKONOMI PEMBANGUNAN INDONESIA: Teori, Kebijakan Kontemporer, dan Tantangan Struktural**" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika pembangunan ekonomi di Indonesia, yang hingga kini masih menjadi salah satu agenda paling menantang sekaligus paling fundamental bagi kelangsungan bangsa.

Pembangunan ekonomi Indonesia bukanlah sekadar soal angka pertumbuhan atau capaian makroekonomi semata. Lebih dari itu, ia menyangkut transformasi struktural, keadilan sosial, dan kedaulatan ekonomi. Seperti yang telah lama diingatkan oleh para pemikir ekonomi nasional, pembangunan yang kokoh hanya dapat tegak jika industrialisasi diletakkan sebagai pilar utama penciptaan nilai tambah, dan negara hadir sebagai pengarah strategi ekonomi yang berkeadilan. Di tengah gejolak global, ketergantungan pada ekspor komoditas dan utang luar negeri masih membayangi, sementara hilirisasi dan penguatan pasar domestik menjadi keniscayaan yang tak terelakkan.

Buku ini disusun dengan maksud untuk menjadi bahan bacaan dan rujukan bagi mahasiswa, akademisi, serta para pengambil kebijakan yang ingin mendalami ilmu ekonomi pembangunan, khususnya dalam konteks kekinian Indonesia. Materi dalam buku ini dirancang untuk mengantarkan pembaca memahami:

1. Dasar-dasar Teori Ekonomi Pembangunan yang menjadi landasan analisis terhadap perekonomian negara berkembang, mulai dari konsep pertumbuhan hingga perubahan struktural.
2. Kebijakan Kontemporer yang diterapkan dalam merespons tantangan global, termasuk strategi hilirisasi, kebijakan fiskal, dan upaya diversifikasi ekonomi di tengah perlambatan global.

3. Tantangan Struktural yang menjadi pekerjaan rumah besar bangsa, seperti kesenjangan ekonomi, dominasi konglomerasi, ketergantungan impor, dan rendahnya daya saing industri.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian, kami berharap buku ini mampu memberikan kontribusi pemikiran sekaligus membuka ruang diskusi kritis bagi perbaikan kebijakan ekonomi di masa depan. Kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi siapa pun yang berkeinginan untuk turut serta dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia yang berdaulat, inklusif, dan berkelanjutan.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PARADIGMA TEORI EKONOMI PEMBANGUNAN DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA	1
(Ahmad Maulidizen)	
Pendahuluan	2
Paradigma Utama Teori Ekonomi Pembangunan	3
Konstruksi Paradigma Ekonomi Pembangunan Syariah	7
Problematika Pembangunan Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Syariah	10
Model dan Agenda Kebijakan Pembangunan Syariah di Indonesia	13
Simpulan	16
Daftar Pustaka	18
Profil Penulis	21
BAB 2 SEJARAH EVOLUSI STRUKTUR EKONOMI INDONESIA DARI MASA KE MASA	22
(Muhammad Astri Yulidar Abbas)	
Pendahuluan	23
Kerangka Teoretis Singkat Transformasi Struktural	23
Masa Kolonial Belanda (1600-1945): Dominasi Agraris dan Ekstraktif	24
Masa Awal Kemerdekaan (1945-1965): Rekonstruksi, Nasionalisasi, dan Ekonomi Negara	25
Masa Orde Baru (1966-1998): Stabilisasi, Boom Minyak, dan Industrialisasi	26
Krisis Ekonomi Asia (1997-1998): Titik Balik Struktur Ekonomi	26
Era Reformasi (1999-2010): Desentralisasi dan Pergeseran ke Sektor Jasa	27
Era Digital dan Hilirisasi (2011-2025): Nilai Tambah, Platform, dan Transformasi Teknologi	28

Menuju Indonesia Emas 2045: Ekonomi Hijau, Biru, Digital, dan Berbasis Pengetahuan	29
Implikasi Akademik dan Kebijakan	30
Kesimpulan	31
Daftar Pustaka	33
Profil Penulis	36
BAB 3 TEORI DUALISME EKONOMI DAN KARAKTERISTIK NEGARA BERKEMBANG DALAM KONTEKS NASIONAL	37
(Sugeng Susanto)	
Pendahuluan	38
Konsep dan Teori Dualisme Ekonomi.....	39
Karakteristik Negara Berkembang dalam Perspektif Ekonomi Pembangunan.....	44
Dualisme Ekonomi dalam Perekonomian Indonesia Kontemporer.....	46
Kebijakan Kontemporer Mengatasi Dualisme Ekonomi.....	52
Tantangan Struktural Ekonomi Indonesia	56
Menuju Indonesia Emas 2045	57
Daftar Pustaka	59
Profil Penulis	62
BAB 4 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL: SISTEM, DOKUMEN, DAN MODEL KELEMBAGAAN	63
(Mogie Demsi Oemar)	
Pendahuluan	64
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)	66
Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional.....	68
Tahapan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional ...	71
Model Kelembagaan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional.....	75
Pendekatan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional.....	78
Penutup	82
Daftar Pustaka	84
Profil Penulis	86
BAB 5 PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA: FAKTOR PENDORONG DAN JEBAKAN PENDAPATAN MENENGAH (<i>MIDDLE-INCOME TRAP</i>)	88

(Akhmad Solikin)	
Pendahuluan	89
Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.....	89
Faktor Penghambat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.....	95
Jebakan Pendapatan Menengah (<i>Middle-Income Trap</i>)	96
Kebijakan Mengatasi <i>Middle-Income Trap</i>	97
Daftar Pustaka.....	99
Profil Penulis.....	101
BAB 6 KETIMPANGAN PENDAPATAN, KOEFISIEN GINI, DAN STRATEGI PERTUMBUHAN INKLUSIF	102
(Mochamad Heru Riza Chakim)	
Pendahuluan	103
Konsep dan Teori Ketimpangan Pendapatan.....	103
Pengukuran Ketimpangan Pendapatan	106
Dinamika dan Karakteristik Ketimpangan di Indonesia.....	109
Strategi Pertumbuhan Inklusif untuk Mengurangi Ketimpangan.....	112
Daftar Pustaka.....	116
Profil Penulis.....	119
BAB 7 DINAMIKA KETENAGAKERJAAN, PENGANGGURAN STRUKTURAL, DAN BONUS DEMOGRAFI	120
(Nurlaila Hanum)	
Pendahuluan	121
Konsep dan Teori Ketenagakerjaan dalam Ekonomi	122
Struktur dan Karakteristik Pasar Kerja Indonesia	124
Pengangguran: Konsep, Jenis, dan Determinan	125
Pengangguran Struktural di Indonesia	125
Bonus Demografi.....	126
Kebijakan Ketenagakerjaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	130
Transformasi Keterampilan pada Sektor Elektronik Indonesia	131
Kesimpulan.....	132
Daftar Pustaka.....	134
Profil Penulis.....	136

BAB 8 SEKTOR JASA, UMKM, DAN PERANNYA SEBAGAI PENOPANG EKONOMI DOMESTIK.....	137
(Gautama Sastra Waskita)	
Sektor Jasa dan UMKM: Fondasi Baru Ekonomi Indonesia	138
Sektor Jasa sebagai Penggerak Pertumbuhan Modern.....	142
UMKM: Penyangga Ketahanan dan Pertumbuhan Ekonomi ..	145
Transformasi Digital UMKM: Dari Lokal Menuju Global.....	149
Ekosistem Nilai: Kolaborasi, Inovasi, dan Keberlanjutan sebagai Keunggulan Kompetitif	151
Generasi Z dan Masa Depan Kewirausahaan Indonesia	155
Tantangan Struktural dan Arah Kebijakan.....	157
Dari Penopang Ekonomi Domestik Menuju Pemain Global	161
Daftar Pustaka	166
Profil Penulis	170
BAB 9 DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PEMERATAAN PEMBANGUNAN	171
(Ahmad Nashiruddin Mushoddiq Rahman)	
Pendahuluan	172
Desentralisasi Fiskal dan Pemerataan Pembangunan: Konsep dan Pengembangan Kebijakan	173
Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pemerataan Pembangunan.....	175
Tantangan Struktural Desentralisasi Fiskal.....	180
Arah Penguatan Kebijakan Desentralisasi Fiskal	183
Penutup	184
Daftar Pustaka	185
Profil Penulis	188
BAB 10 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN.....	189
(Wiljan Atfentia Kotngoran)	
Konsep Definisi Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan.....	190
Permasalahan Pembangunan Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan.....	193
Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan Di Indonesia.....	197

Daftar Pustaka.....	202
Profil Penulis.....	204
BAB 11 KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL OPTIMASI PAJAK, PENGELOLAAN UTANG, DAN ALOKASI APBN	205
(Ahmad Nashiruddin Mushoddiq Rahman)	
Pendahuluan	206
Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Pembangunan..	206
Optimalisasi Pajak dan Penguatan Kapasitas Fiskal.....	209
Pengelolaan Utang dan Keberlanjutan Fiskal	211
Alokasi APBN dan Kualitas Belanja Pembangunan	213
Tantangan Struktural dan Arah Reformasi Kebijakan Fiskal.	216
Penutup	217
Daftar Pustaka.....	218
Profil Penulis.....	221
BAB 12 EKONOMI SUMBER DAYA ALAM, KUTUKAN SUMBER DAYA (<i>RESOURCE CURSE</i>), DAN KETAHANAN ENERGI.....	222
(Muhammad Daffa Z)	
Ekonomi Sumber Daya Alam dalam Perspektif Pembangunan.....	223
Kutukan Sumber Daya (<i>Resource Curse</i>) dan Dampaknya.....	229
Ketahanan Energi dan Transformasi Berkelanjutan	232
Daftar Pustaka.....	236
Profil Penulis.....	238
BAB 13 TRANSFORMASI EKONOMI DIGITAL: <i>E-COMMERCE</i>, <i>FINTECH</i>, DAN KESIAPAN TENAGA KERJA ERA 4.0	239
(Ellen D. Oktanti Irianto)	
Transformasi Digital dalam Ekonomi Pembangunan Indonesia	240
<i>E-Commerce</i> : Pertumbuhan, Struktur Pasar, dan Dampak Ekonomi	241
<i>Fintech</i> : Inklusi Keuangan dan Transformasi Sistem Pembayaran.....	243
Disrupsi Pasar Tenaga Kerja di Era Revolusi Industri 4.0	245
Kesiapan SDM dan Kebijakan Pengembangan Talenta Digital	247
Ringkasan	250

Daftar Pustaka.....	251
Profil Penulis.....	257
BAB 14 EKONOMI HIJAU DAN STRATEGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.....	258
(Hardjanto Nusantara)	
Pendahuluan: Mengapa Ekonomi Hijau Menjadi sebuah Keniscayaan?.....	259
Memahami Konsep Ekonomi Hijau.....	259
Ekonomi Hijau dan SDGs: Hubungan yang Tak Terpisahkan.....	261
Implementasi Ekonomi Hijau di Indonesia.....	262
Dampak dan Tantangan Ekonomi Hijau di Indonesia.....	263
Strategi Percepatan Transisi Ekonomi Hijau.....	264
Jalan Menuju Indonesia Emas 2045.....	265
Ringkasan.....	266
Studi Kasus Kebijakan dan Proyek Ekonomi Hijau.....	267
Daftar Pustaka.....	273
Profil Penulis.....	274
BAB 15 PERUBAHAN IKLIM, MITIGASI BENCANA, DAN DAMPAK SOSIO-EKONOMI DI INDONESIA	275
(Edwin Basmar)	
Pendahuluan.....	276
Perubahan Iklim dan Stabilitas Keuangan.....	277
Perubahan Iklim dan Pertumbuhan Perekonomian.....	281
Daftar Pustaka.....	286
Profil Penulis.....	289
BAB 16 EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN DAN PROSPEK STRATEGIS EKONOMI MASA DEPAN.....	290
(Zainal Arifin)	
Evaluasi Capaian Pembangunan Indonesia.....	291
Analisis SWOT Perekonomian Indonesia.....	293
Prospek Strategis Ekonomi Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045	295
Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Masa Depan.....	298
Daftar Pustaka.....	300
Profil Penulis.....	301



BAB 1

PARADIGMA TEORI EKONOMI PEMBANGUNAN DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA

Dr. Ahmad Maulidizen, S.E.Sy., M.Sh., M.M.
Universitas Dian Nusantara



Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan konsep yang terus mengalami perubahan sejalan dengan berkembangnya persoalan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Pada tahap awal, pembangunan lebih banyak dipahami sebagai proses peningkatan pendapatan nasional melalui akumulasi modal, investasi, industrialisasi, dan pertumbuhan *output*. Pandangan tersebut kemudian dikritik karena pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh berkurangnya kemiskinan, terciptanya pekerjaan yang layak, membaiknya distribusi pendapatan, atau meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Literatur ekonomi pembangunan kontemporer menempatkan pembangunan sebagai proses multidimensional yang mencakup pertumbuhan, pengurangan kemiskinan, perlindungan terhadap kerentanan, pemerataan, pemenuhan kebutuhan dasar, keberlanjutan sumber daya, dan peningkatan kualitas hidup. Dengan demikian, pendapatan bukan satu-satunya indikator pembangunan, melainkan salah satu sarana untuk memperluas kemampuan manusia dan memperbaiki struktur kehidupan sosial (de Janvry & Sadoulet, 2021).

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa teori pembangunan tidak bersifat tunggal. Setiap paradigma berangkat dari asumsi yang berbeda mengenai penyebab keterbelakangan, mekanisme perubahan ekonomi, peran negara dan pasar, serta ukuran keberhasilan pembangunan. Teori pertumbuhan menekankan akumulasi modal; teori perubahan struktural menekankan peralihan tenaga kerja menuju sektor yang lebih produktif; teori ketergantungan menyoroti struktur kekuasaan global; pendekatan neoliberal mengutamakan pasar dan stabilitas makroekonomi; sedangkan paradigma pembangunan manusia, kelembagaan, inklusif, dan berkelanjutan memperluas perhatian kepada kualitas manusia, distribusi, tata kelola, dan lingkungan.

Meskipun mengalami perkembangan, teori pembangunan arus utama belum sepenuhnya menyelesaikan pertanyaan normatif mengenai tujuan akhir pembangunan. Peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kebebasan memilih tetap memerlukan kriteria moral untuk menentukan jenis kegiatan ekonomi yang layak dikembangkan, cara kekayaan diperoleh dan didistribusikan, serta batas eksploitasi terhadap manusia dan alam.

Ekonomi pembangunan syariah menawarkan perspektif yang relevan untuk menjawab persoalan tersebut. Pembangunan dalam Islam tidak hanya diarahkan pada kemakmuran material, tetapi pada pencapaian *al-falāh*, yaitu keberhasilan manusia secara material, sosial, moral, dan spiritual. Tauhid, amanah, khilafah, keadilan, kemaslahatan, persaudaraan, dan *Maqasid Syariah* menjadi dasar untuk mengevaluasi tujuan, proses, serta dampak pembangunan.

Namun, ekonomi pembangunan syariah tidak seharusnya diposisikan secara simplistik sebagai antitesis terhadap seluruh teori konvensional. Ilmu ekonomi modern telah menghasilkan berbagai instrumen analisis yang berguna untuk memahami pertumbuhan, produktivitas, kemiskinan, kelembagaan, dan perubahan struktural. Ekonomi pembangunan syariah perlu mengadopsi temuan yang relevan secara selektif, sekaligus merekonstruksi tujuan dan mekanismenya berdasarkan prinsip Islam.

Relevansi pembahasan ini terlihat dalam kondisi pembangunan Indonesia. Perekonomian Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025 dengan PDB per kapita sebesar Rp83,7 juta. Namun, aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yang menyumbang 56,93 persen perekonomian nasional. Pada September 2025 masih terdapat 23,36 juta penduduk miskin, sedangkan rasio Gini tercatat sebesar 0,363. Data tersebut menunjukkan adanya kemajuan agregat yang masih disertai masalah distribusi, kualitas pekerjaan, ketahanan rumah tangga, dan kesenjangan wilayah.

Bab ini menggunakan pendekatan konseptual-teoretis melalui sintesis kritis atas literatur pembangunan dan ekonomi Islam terbitan 2021–2026, dilengkapi data resmi untuk membaca konteks Indonesia. Pembahasan disusun dalam empat bagian utama, yaitu paradigma teori ekonomi pembangunan, konstruksi ekonomi pembangunan syariah, relevansinya bagi Indonesia, serta kerangka operasional kebijakan pembangunan berbasis *Maqasid Syariah*.

Paradigma Utama Teori Ekonomi Pembangunan

Paradigma awal pembangunan didominasi oleh teori pertumbuhan dan tahapan linear. Keterbelakangan dianggap terjadi karena negara

Daftar Pustaka

- Avdukic, A., & Asutay, M. (2025). Testing the development impact of Islamic banking: The Islamic moral economy approach to development. *Economic Systems*, 49(2), Article 101229. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2024.101229>
- Badan Pusat Statistik. (2025, November 5). Indeks pembangunan manusia Indonesia tahun 2025 mencapai 75,90, meningkat 0,88 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 75,02. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/05/2480/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2025-mencapai-75-90--meningkat-0-88-poin-dibandingkan-tahun-sebelumnya-yang-sebesar-75-02-.html>
- Badan Pusat Statistik. (2026a, February 5). Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2546/ekonomi-indonesia-tahun-2025-tumbuh-5-11-persen.html>
- Badan Pusat Statistik. (2026b, February 5). Gini ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2535/gini-ratio-september-2025-tercatat-sebesar-0-363-.html>
- Badan Pusat Statistik. (2026c, February 5). November 2025: Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,74 persen dan rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2547/keadaan-ketenagakerjaan-.html>
- Badan Pusat Statistik. (2026d, February 5). Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/persentase-penduduk-miskin-september-2025-turun--menjadi-8-25-persen-.html>
- Bank Indonesia. (2026). Kajian ekonomi dan keuangan syariah 2025. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/KEKSI_2025.aspx
- de Janvry, A., & Sadoulet, E. (2021). Development economics: Theory

- and practice (2nd ed.). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781003024545>
- Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie, E., Widiastuti, T., Fauzi, Q., & Shofawati, A. (2024). Zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(4), 643–660. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025). Rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029. <https://www.bappenas.go.id/datapublikasishow?jenis=RPJMN&q=Rencana+Pembangunan+dan+Rencana+Kerja+Pemerintah&tahun=2025>
- Mahtaney, P. (2021). *Structural transformation: Understanding the new drivers of investment, innovation and institutions*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-981-33-4662-8>
- Nanga, M., & Widjaja, W. (2024). Structural transformation in the Indonesian economy: Why does ‘financial development’ matter? *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 19(2), 213–222. <https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v19i2.2024.pp213-222>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023–2027. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-Perbankan-Syariah-Indonesia-2023-2027/Roadmap%20Pengembangan%20dan%20Penguatan%20Perbankan%20Syariah%20Indonesia%20%28RP3SI%29%202023-2027.pdf>
- Tahir, T., & Hamid, S. H. A. (2024). Maqasid al-Syari’ah transformation in law implementation for humanity. *International Journal Ihya’ ‘Ulum al-Din*, 26(1), 119–131. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>
- United Nations Development Programme. (2024). Human development report 2023–2024: Breaking the gridlock—

- Reimagining cooperation in a polarized world.
<https://doi.org/10.18356/9789213588703>
- Widiastuti, T., Ningsih, S., Prasetyo, A., Mawardi, I., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Hady, A. F. (2022). Developing an integrated model of Islamic social finance: Toward an effective governance framework. *Heliyon*, 8(9), Article e10383.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10383>
- World Bank. (2021). Pathways to middle-class jobs in Indonesia.
<https://doi.org/10.1596/35848>
- World Bank. (2023). Indonesia poverty assessment: Pathways towards economic security. <https://doi.org/10.1596/39799>
- World Bank. (2024). World development report 2024: The middle-income trap. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-2078-6>
- World Bank. (2026). Running faster, for longer: Structural transformation, productivity, and good jobs—Indonesia country growth and jobs report.
<https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-growth-and-jobs-report-running-faster-for-longer-structural-transformation-productivity-and-good-jobs>
- Zailani, M. N., Mohd Satar, N. H., & Zakaria, R. H. (2022). Maqasid al-Shariah based index of socio-economic development: A literature review. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 19(1), 47–62. <https://doi.org/10.33102/jmifr.v19i1.409>

PROFIL PENULIS



Dr. Ahmad Maulidizen, S.E.Sy, M.Sh, M.M.

Beliau merupakan akademisi dan peneliti pada Program Studi Manajemen Universitas Dian Nusantara, Indonesia, dengan kepakaran dalam bidang bisnis dan keuangan Islam, manajemen sumber daya manusia berbasis nilai Islam, kewirausahaan Islam, serta manajemen rantai pasok halal. Aktivitas akademiknya didukung oleh produktivitas penelitian yang tinggi, dengan menghasilkan lebih dari 145 publikasi ilmiah dan memperoleh lebih dari 1.287 sitasi berdasarkan Google Scholar. Rekam jejak akademiknya juga tercermin melalui capaian indeksasi, yaitu Google Scholar h-index 18, Scopus h-index 2, dan Sinta Score Overall sebesar 2.210.

Kontribusi ilmiah Dr. Ahmad Maulidizen telah memberikan pengaruh signifikan terhadap pengembangan kajian ekonomi Islam, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Kepakaran beliau diperkuat melalui keterlibatan sebagai *reviewer* pada berbagai jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus serta melalui karya-karya akademik yang mengintegrasikan pendekatan teoritis dengan implementasi praktis dalam ekonomi Islam, bisnis syariah, dan etika ekonomi. Selain aktif dalam penelitian dan publikasi, beliau juga berkontribusi sebagai pembicara dalam berbagai forum ilmiah nasional dan internasional, termasuk konferensi di Turki, Uzbekistan, Malaysia, dan Thailand.

Email Penulis: ahmad.maulidizen@dosen.undira.ac.id.



BAB 2

SEJARAH EVOLUSI STRUKTUR EKONOMI INDONESIA DARI MASA KE MASA

Dr. Muhammad Astri Yulidar Abbas, S.E., M.M.
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Pendahuluan

Struktur ekonomi merujuk pada komposisi sektor-sektor pembentuk perekonomian, terutama kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, pertambangan, perdagangan, keuangan, transportasi, informasi-komunikasi, dan jasa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, serta penciptaan nilai tambah. Dalam literatur pembangunan, perubahan struktur ekonomi dipahami sebagai proses pergeseran sumber daya dari sektor berproduktivitas rendah menuju sektor berproduktivitas lebih tinggi. Kuznets (1973) menempatkan perubahan struktur sebagai salah satu ciri utama pertumbuhan ekonomi modern, sedangkan Lewis (1954) menjelaskan perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern sebagai inti transformasi pembangunan.

Dalam konteks Indonesia, evolusi struktur ekonomi tidak hanya mencerminkan perubahan kontribusi sektoral, tetapi juga perubahan rezim kebijakan, kapasitas kelembagaan, arah industrialisasi, integrasi global, serta kesiapan sumber daya manusia. Literatur ekonomi pembangunan menunjukkan bahwa transformasi struktural idealnya berlangsung dari ekonomi agraris menuju industrialisasi, lalu berlanjut pada jasa modern dan ekonomi berbasis pengetahuan (Chenery & Syrquin, 1975; Herrendorf et al., 2014; Timmer & de Vries, 2009). Namun, lintasan Indonesia tidak selalu linear karena dipengaruhi kolonialisme, nasionalisasi, boom minyak, deregulasi, krisis Asia 1997-1998, reformasi politik, desentralisasi, digitalisasi, dan hilirisasi sumber daya alam.

Bab ini membahas fase-fase evolusi struktur ekonomi Indonesia dari masa kolonial hingga agenda Indonesia Emas 2045. Penekanan diberikan pada ciri-struktur sektoral, arah kebijakan utama, serta tantangan produktivitas agar pembaca memahami bahwa transformasi ekonomi bukan sekadar perpindahan kontribusi sektor, melainkan perubahan mendasar dalam basis produksi, kualitas tenaga kerja, teknologi, kelembagaan, dan nilai tambah nasional.

Kerangka Teoretis Singkat Transformasi Struktural

Secara teoretis, transformasi struktural terjadi ketika tenaga kerja, modal, teknologi, dan aktivitas produksi berpindah dari sektor tradisional yang padat karya dan berproduktivitas rendah ke sektor

modern yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Model Lewis (1954) menekankan dualisme sektor tradisional-modern, sedangkan Kuznets (1973) menekankan perubahan komposisi *output*, tenaga kerja, urbanisasi, dan distribusi pendapatan dalam proses pertumbuhan jangka panjang. Gollin et al. (2002) memperkuat pandangan bahwa peningkatan produktivitas pertanian merupakan prasyarat penting bagi pelepasan tenaga kerja menuju sektor nonpertanian tanpa menimbulkan tekanan pangan dan kemiskinan pedesaan.

Literatur kontemporer menambahkan dua catatan penting. Pertama, transformasi struktural baru memberi dampak tinggi ketika perpindahan tenaga kerja benar-benar menuju sektor dengan produktivitas lebih tinggi, bukan sekadar berpindah dari pertanian ke jasa informal berproduktivitas rendah (McMillan et al., 2014; Ryandiansyah, 2019). Kedua, negara berkembang dapat mengalami deindustrialisasi prematur, yaitu penurunan peran manufaktur sebelum sektor tersebut mencapai kapasitas produktif optimal (Rodrik, 2016). Oleh karena itu, pembacaan evolusi struktur ekonomi Indonesia perlu memperhatikan kualitas transformasi, bukan hanya perubahan persentase kontribusi sektoral.

Masa Kolonial Belanda (1600-1945): Dominasi Agraris dan Ekstraktif

Pada masa kolonial, perekonomian Indonesia dibentuk terutama untuk memenuhi kebutuhan perdagangan dan industri Belanda. Sistem ekonomi kolonial menempatkan wilayah Nusantara sebagai sumber bahan baku, komoditas ekspor, dan tenaga kerja murah. Kebijakan *Cultuurstelsel* atau Sistem Tanam Paksa sejak 1830 mewajibkan penduduk menanam komoditas ekspor seperti kopi, gula, teh, nila, dan tembakau. Booth (1998) menunjukkan bahwa struktur ekonomi Hindia Belanda bercirikan pertumbuhan *output* komoditas ekspor, pembangunan infrastruktur yang berorientasi pelabuhan dan perkebunan, serta keterbatasan industrialisasi domestik.

Karakter ekonomi kolonial tersebut menghasilkan dualisme: sektor modern berada dalam jaringan perusahaan, perkebunan, perbankan, pelayaran, dan perdagangan kolonial, sedangkan ekonomi rakyat tetap berada pada pertanian subsisten dan pasar lokal. Dari

Daftar Pustaka

- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. *American Economic Review*, 91(5), 1369-1401. <https://doi.org/10.1257/aer.91.5.1369>
- Badan Pusat Statistik. (2026). Indonesia's economic growth in 2025 was 5.11 percent. BPS-Statistics Indonesia. <https://www.bps.go.id/>
- Booth, A. (1998). The Indonesian economy in the nineteenth and twentieth centuries: A history of missed opportunities. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9780333994962>
- Chenery, H. B., & Syrquin, M. (1975). Patterns of development, 1950-1970. Oxford University Press for the World Bank.
- Dick, H., Houben, V. J. H., Lindblad, J. T., & Thee, K. W. (2002). The emergence of a national economy: An economic history of Indonesia, 1800-2000. University of Hawai'i Press.
- Gollin, D., Parente, S., & Rogerson, R. (2002). The role of agriculture in development. *American Economic Review*, 92(2), 160-164. <https://doi.org/10.1257/000282802320189177>
- Google, Temasek, & Bain & Company. (2025). *e-Conomy SEA 2025: From digital decade to AI reality*. <https://economysea.withgoogle.com/>
- Hayashi, M. (2005). Structural changes in Indonesian industry and trade: An input-output analysis. *The Developing Economies*, 43(1), 39-71. <https://doi.org/10.1111/j.1746-1049.2005.tb00252.x>
- Hendarmin, H., & Wahyudi, S. T. (2023). Structural transformation patterns and factors that influenced the case in Indonesia. *JurnalEconomia*, 19(1), 112-126. <https://doi.org/10.21831/economia.v19i1.36818>
- Herrendorf, B., Rogerson, R., & Valentinyi, A. (2014). Growth and structural transformation. In P. Aghion & S. N. Durlauf (Eds.), *Handbook of economic growth* (Vol. 2, pp. 855-941). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53540-5.00006-9>

- Hill, H. (2000). *The Indonesian economy* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Iriana, R., & Sjöholm, F. (2002). Indonesia's economic crisis: Contagion and fundamentals. *The Developing Economies*, 40(2), 135-151. <https://doi.org/10.1111/j.1746-1049.2002.tb01004.x>
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2025). Gerbang investasi hilirisasi Indonesia. <https://www.bkpm.go.id/>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2026). *Indonesia Emas 2045: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045*. <https://indonesia2045.go.id/>
- Kuznets, S. (1973). Modern economic growth: Findings and reflections. *American Economic Review*, 63(3), 247-258.
- Lewis, W. A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labor. *The Manchester School*, 22(2), 139-191. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.x>
- Lin, J. Y. (2012). New structural economics: A framework for rethinking development and policy. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8955-3>
- McMillan, M., Rodrik, D., & Verduzco-Gallo, Í. (2014). Globalization, structural change, and productivity growth, with an update on Africa. *World Development*, 63, 11-32. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.10.012>
- Rodrik, D. (2016). Premature deindustrialization. *Journal of Economic Growth*, 21(1), 1-33. <https://doi.org/10.1007/s10887-015-9122-3>
- Ryandiansyah, N. R. (2019). Structural change, productivity, and the shift to services: The case of Indonesia. *Economics and Finance in Indonesia*, 64(2), article 1. <https://doi.org/10.47291/efi.v64i2.593>
- Sander, F. G., & Yoong, P. S. (2020). Structural transformation and labor productivity in Indonesia: Where are all the good jobs? World Bank.
- Tambunan, T. T. H. (2019). *Perekonomian Indonesia: Kajian teoretis dan analisis empiris*. Ghalia, Indonesia.

Timmer, M. P., & de Vries, G. J. (2009). Structural change and growth accelerations in Asia and Latin America: A new sectoral data set. *Cliometrica*, 3(2), 165-190. <https://doi.org/10.1007/s11698-008-0029-5>

World Bank. (2000). Indonesia: Managing decentralization. World Bank.

World Bank. (2026). Indonesia economic prospects, June 2026. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-prospect>

PROFIL PENULIS



Dr. Muhammad Astri Yulidar Abbas, S.E., M.M.

Penulis merupakan akademisi pada ilmu Ekonomi dan Bisnis, khususnya bidang Manajemen Keuangan. Penulis memiliki keterlibatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kurikulum berbasis *Outcome Based Education* (OBE). Penulis menyelesaikan studi S1 pada Program Studi di Manajemen Konsentrasi Keuangan Perusahaan di STIE Malangkecewara Malang, studi S2 pada Program Studi di Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan di Universitas Mulawarman, dan studi S3 pada Program Studi Ilmu Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan di Universitas Mulawarman.

Fokus penelitian dan pengabdian meliputi ekonomi bisnis dengan kekhususan *corporate finance*, *financial technology*, keuangan UMKM, perilaku keuangan, dan *strategic financial management*. Penulis aktif menghasilkan publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi SINTA maupun prosiding internasional serta terlibat dalam berbagai kegiatan akademik dan pengembangan kelembagaan perguruan tinggi.

Email Penulis: astri@uwgm.ac.id

BAB 3
TEORI DUALISME
EKONOMI DAN
KARAKTERISTIK
NEGARA BERKEMBANG
DALAM KONTEKS
NASIONAL

Sugeng Susanto, S.E., M.M.
Universitas Raharja



Pendahuluan

Gagasan mengenai dualisme ekonomi pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh J. H. Boeke, seorang sarjana sekaligus pejabat kolonial Belanda yang menghabiskan puluhan tahun mengamati langsung kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Hindia Belanda. Pemikirannya lahir dari keresahan terhadap kegagalan teori ekonomi Barat dalam menjelaskan perilaku ekonomi masyarakat pribumi yang, menurut pengamatannya, tidak sepenuhnya tunduk pada logika rasionalitas ekonomi sebagaimana diasumsikan dalam ilmu ekonomi klasik. Meskipun kerangka berpikir Boeke lahir dalam konteks kolonial dan kemudian banyak dikritik karena dianggap terlalu menyederhanakan persoalan serta cenderung berbau etnosentris, gagasan dasarnya tentang keberadaan dua sistem ekonomi yang tumbuh berdampingan tanpa saling meleburkan diri tetap relevan sebagai pijakan awal untuk memahami ketimpangan struktural yang mewarnai perekonomian negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Relevansi teori dualisme Boeke terhadap kondisi Indonesia hari ini terletak bukan pada ketepatan setiap detail argumennya, melainkan pada kemampuannya membuka ruang pertanyaan yang masih relevan hingga sekarang. Ketika sebagian masyarakat telah mengakses layanan perbankan digital dan berpartisipasi dalam ekonomi platform, sebagian lain masih bergantung pada sistem barter, pinjaman informal, atau pertanian subsisten yang nyaris tidak tersentuh teknologi. Kesenjangan semacam ini menegaskan bahwa dualisme ekonomi bukan sekadar warisan sejarah, melainkan persoalan struktural yang terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman, dari dualisme antara pribumi dan asing pada masa kolonial menjadi dualisme antara Jawa dan luar Jawa, antara sektor formal dan informal, serta antara yang terhubung secara digital dan yang tertinggal di belakangnya.

Urgensi mengkaji ulang teori dualisme dalam konteks nasional saat ini juga tidak lepas dari kenyataan bahwa Indonesia sedang berada pada persimpangan penting menuju status negara berpendapatan tinggi. Berbagai lembaga pemeringkat maupun kajian akademik menempatkan Indonesia dalam kelompok negara yang

berisiko terjebak dalam perangkap pendapatan menengah, sebuah kondisi yang oleh banyak pihak diyakini berakar pada persoalan struktural yang belum tuntas terselesaikan, termasuk dualisme ekonomi yang membatasi optimalisasi seluruh potensi sumber daya nasional.

Konsep dan Teori Dualisme Ekonomi

1. Definisi Dualisme Ekonomi

Secara etimologis istilah dualisme berasal dari kata "dual" yang berarti dua atau ganda, yang dalam konteks ilmu ekonomi digunakan untuk menggambarkan keberadaan dua struktur, sistem, atau corak kegiatan ekonomi yang berjalan bersamaan dalam satu wilayah tanpa terjadi proses peleburan atau konvergensi yang berarti di antara keduanya. Boeke (1997) mendefinisikan dualisme sosial sebagai benturan antara sistem sosial yang berasal dari luar dengan sistem sosial pribumi yang telah ada sebelumnya, di mana kedua sistem tersebut memiliki corak kejiwaan yang berbeda secara mendasar. Menurutnya, masyarakat pribumi digerakkan oleh apa yang ia sebut sebagai kebutuhan terbatas dan semangat kebersamaan, sementara sistem yang dibawa dari luar bergerak berdasarkan prinsip keuntungan maksimal dan rasionalitas kalkulatif ala kapitalisme Barat.

Dalam perkembangan ilmu ekonomi pembangunan, konsep dualisme kemudian diperluas dan tidak lagi terbatas pada dimensi sosial semata. Setidaknya terdapat lima ragam dualisme yang lazim dibahas dalam literatur. Pertama, dualisme sosial, yaitu perbedaan mendasar dalam nilai, norma, dan orientasi hidup antara kelompok masyarakat modern dengan kelompok tradisional. Kedua, dualisme teknologi, yang merujuk pada kesenjangan tingkat teknologi produksi antara sektor modern yang menggunakan mesin dan metode produksi mutakhir dengan sektor tradisional yang masih mengandalkan cara-cara produksi sederhana dan padat karya. Ketiga, dualisme finansial, yang menggambarkan terpisahnya sistem keuangan formal berbasis perbankan dari sistem keuangan informal seperti arisan, rentenir, atau pinjaman

Daftar Pustaka

- Amalia, F., Sinaga, R., & Asyari. (2024). *Ekonomi pembangunan: Aspek-aspek penting*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Analisis konsep dualisme dalam ekonomi: Tinjauan kritik Mackie, Higgins, dan Manning. (2026).
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Data PDB dan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024*. Jakarta: BPS.
- Bank Indonesia. (2018). *Lima tantangan struktural utama ekonomi* [Siaran pers]. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2024). *Arah bauran kebijakan Bank Indonesia tahun 2024* [Siaran pers. No. 26/32/DKom]. Jakarta: Bank Indonesia.
- Boeke, J. H. (1997). *Ekonomi asli dan asing: Sama dan berlainan*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Databoks. (2024). *Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB*.
- Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*. (2024). Vol. 24, No. 1.
- Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*. (2024).
- Journal of Development Economics*. (2024). Recent issues.
- Journal of International Development Economics*. (2024). Vol. 36, Issue 8.
- Journal of International Development*. (2024). Vol. 36, Issue 8.
- Jurnal Ekonomi dan Bisnis Akuntansi (JEBA)*. (2026). *Tantangan dualisme ekonomi di Indonesia: Tradisional vs modern*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*. (2024). Vol. 13, No. 1. Denpasar: Garba Rujukan Digital.
- Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*. (2025). Vol. 14, No. 2. Denpasar: Garba Rujukan Digital.
- Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Areai*. (2025). *Masalah pokok*

- pembangunan: Masalah dualisme dan masalah populasi.
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia. (2024).
Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. (2024). Vol. 24, No. 1.
Jurnal Ekonomi STIEP Pontianak. (2024). Vol. 9, No. 1.
Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis. (2024).
Jurnal Ilmu Ekonomi (JIEM). (2026). Dualisme indikator makroekonomi Indonesia: Telaah deskriptif.
Jurnal STEI Ekonomi. (2021). Vol. 30, No. 1, 20–32.
Kementerian Ekonomi Republik Indonesia. (2025). Laporan ekonomi Indonesia terkini, Juni 2025.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Lima tantangan struktural ekonomi Indonesia: Refleksi 20 tahun reformasi.
Kuncoro, M. (1999/2022). Ekonomi pembangunan: Teori, masalah, dan kebijakan. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kuncoro, M. (2022). Ekonomi pembangunan: Teori, masalah, dan kebijakan (Edisi revisi). Yogyakarta: UPP YMP YKPN.
Manning, C. (2021). Dinamika pasar tenaga kerja dan dualisme ekonomi Indonesia.
Menimbang ulang dualisme J.H. Boeke. (2025). IJIR Indonesia.
Neraca Journal. (2024). Analisis kondisi perekonomian Indonesia 2020–2024.
Nurhayati. (2021). Buku referensi ekonomi pembangunan. Jakarta: Universitas Trisakti.
Pamungkas, S. H. A. (2025). Dinamika perekonomian Indonesia dan agenda kebijakan strategis ke depannya.
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Lampiran I.
Purba, B. (2021). Ekonomi pembangunan. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
Rahmawati, E. (2022). Analisis sektor-sektor ekonomi unggulan dan strategi pembangunan.

- Rimba Journal. (2025). Analisis kondisi perekonomian Indonesia 2020–2024.
- SINTA Kemdiktisaintek. (2024). Jurnal ekonomi dan kebijakan pembangunan.
- Sonpedia Publishing Indonesia. (2025). Buku ajar ekonomi pembangunan.
- Sosius. (2025). Konsep dasar ekonomi internasional dan teori perdagangan.
- Teori dualisme ekonomi Indonesia menurut J.H. Boeke. (2025).
- Teori dualisme ekonomi J.H. Boeke. (2020). Malang: Universitas Brawijaya.
- Tim Penyusun. (2025). Ekonomi pembangunan Indonesia: Konsep, teori, dan strategi.
- Universitas Jambi. (2020). Daftar pustaka ekonomi pembangunan.
- Van der Kolf, G. H. (sebelum PD II). Karangan menentang teori dualisme ekonomi Boeke.
- Wahyuni, S. (2021). Dampak perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi negara berkembang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 16(1), 55–68.
- Woestho, C., & Sulistyowati, A. (2021). Prioritas pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi. *Jurnal STEI Ekonomi*.

PROFIL PENULIS



Sugeng Susanto, S.E., M.M.

Ketertarikan penulis menulis buku terhadap ilmu ekonomi dimulai pada tahun 2022 dengan menulis buku *Filsafat Ilmu Akuntansi dan Riset Akuntansi*. Sugeng Susanto S.E., M.M. Lulus S1 Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka dan penulis melanjutkan pendidikan Program Studi Magister Manajemen S2 di Fakultas Ekonomi (FEB) Universitas Esa Unggul Jakarta pada tahun 2018. Penulis memiliki keahlian di bidang manajemen dan teknik industri. Penulis aktif dalam kegiatan penelitian dan konsultasi pada perusahaan-perusahaan yang melakukan perbaikan manajemen strategi di Jawa Tengah dan Jakarta, serta aktif dalam konsultasi pembuatan Raperwal Kota Tangerang Selatan, konsultasi Dinas Perhubungan, dan konsultasi Ekonomi Kreatif di Kota Tangerang Selatan. Beberapa proyek yang dilakukan sebagai tenaga profesional antara lain di *Lighting Industries* dan *Smart Home Systems* di Kantor Pemerintahan IKN, Bandara VIP, dan beberapa proyek strategis nasional.

Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai Dosen Program Studi Kewirausahaan pada Universitas Raharja Tangerang dengan mengampu mata kuliah antara lain *e-commerce*, Inovasi dan kewirausahaan, Modal dan Pembiayaan Koperasi, Bisnis Digital dan Intelegensi Bisnis dan Perancangan Sistem dan Model Bisnis. Penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: sugeng.susanto@raharja.info



BAB 4

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL: SISTEM, DOKUMEN, DAN MODEL KELEMBAGAAN

Dr. Mogie Demsi Oemar S.E., M.E., AWP, CDMP / Ogy Omar
Universitas Pamulang, Universitas Islam Depok



Pendahuluan

Perencanaan pembangunan nasional merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui sistem perencanaan yang terarah, pemerintah mampu menyusun prioritas pembangunan, mengalokasikan sumber daya secara efisien, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bappenas, 2020).

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, perencanaan pembangunan memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi instrumen untuk mengatasi berbagai persoalan struktural, seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengangguran, kesenjangan wilayah, serta rendahnya daya saing ekonomi. Menurut Todaro dan Smith (2021), pembangunan ekonomi bukan hanya diukur melalui pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan kesempatan ekonomi, dan transformasi kelembagaan yang mampu menciptakan pembangunan yang inklusif.

Sejak era reformasi, Indonesia telah mengalami perubahan paradigma dalam sistem perencanaan pembangunan. Jika sebelumnya perencanaan lebih bersifat sentralistik, kini pendekatan pembangunan diarahkan pada sistem yang lebih partisipatif, terintegrasi, transparan, dan berbasis kinerja. Perubahan tersebut ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah (Republik Indonesia, 2004).

Melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah menyusun berbagai dokumen strategis, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta dokumen perencanaan sektoral dan kewilayahan. Dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai

pedoman bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan yang saling terintegrasi (Bappenas, 2023).

Perencanaan pembangunan nasional juga semakin dipengaruhi oleh dinamika global yang berkembang sangat cepat. Transformasi digital, perubahan iklim, bonus demografi, ketahanan pangan, transisi energi, hingga ketidakpastian geopolitik dunia menjadi tantangan baru yang harus direspons melalui kebijakan pembangunan yang adaptif. Oleh karena itu, sistem perencanaan tidak lagi hanya berorientasi pada pencapaian target ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, pembangunan manusia, ketahanan nasional, serta tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* (World Bank, 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia juga mulai mengintegrasikan pendekatan pembangunan berbasis data (*evidence-based policy*) dan transformasi digital ke dalam proses perencanaan. Pemanfaatan teknologi informasi, sistem informasi pembangunan, *big data*, dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) menjadi instrumen penting untuk meningkatkan akurasi perencanaan, efektivitas penganggaran, serta monitoring dan evaluasi pembangunan secara *real-time* (OECD, 2022).

Selain itu, keberhasilan perencanaan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas dokumen perencanaan, tetapi juga oleh efektivitas kelembagaan yang menjalankannya. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), kementerian teknis, pemerintah daerah, DPR, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi dalam membangun sistem perencanaan yang kolaboratif dan akuntabel. Sinergi antarlembaga tersebut menjadi faktor penting agar sasaran pembangunan nasional dapat tercapai secara optimal (Kementerian PPN/Bappenas, 2023).

Bab ini akan membahas secara komprehensif mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia, mulai dari dasar hukum, dokumen perencanaan, mekanisme penyusunan kebijakan, hingga model kelembagaan yang mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Pembahasan ini diharapkan memberikan

Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Grindle, M. S. (1997). *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries*. Cambridge, MA: Harvard Institute for International Development.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD): Pedoman Implementasi*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2023). *Laporan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*. Jakarta: Kementerian PANRB.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020-2023). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022). *Government at a Glance 2022*. Paris: OECD Publishing.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sjafrizal. (2018). *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). *Economic Development* (13th ed.). Harlow: Pearson Education Limited.

United Nations. (2023). *The Sustainable Development Goals Report 2023*. New York: United Nations.

World Bank. (2023). *Indonesia Economic Prospects: Investing in Resilience*. Washington, DC: The World Bank.

PROFIL PENULIS



Dr. Mogie Demsi Oemar, S.E., M.E., CBPA., AWP., CDMF.

Sekolah Dasar Budi Luhur di Kota Tangerang: Sejak masa sekolah dasar, penulis telah menunjukkan pendidikan dasar di salah satu sekolah favorit di Kota Tangerang. SMPN 07 di Balikpapan, Kalimantan Timur: Penulis melanjutkan pendidikan menengahnya di sekolah negeri SMPN 07 di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Selama masa SMP, ia semakin mengembangkan minatnya dalam berbagai mata pelajaran, termasuk ekonomi. SMUN 05 di Balikpapan Kota, Kalimantan Timur. Pada tingkat sekolah menengah atas, Penulis tetap setia dengan sekolah favoritnya di Kalimantan Timur. Di sinilah ia mulai merancang masa depannya dalam dunia bisnis dan ekonomi. S1 Ekonomi di ABFI Institute Banking Jakarta (2004). Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, penulis melanjutkan studi S1 di bidang Manajemen Ekonomi di Jakarta pada tahun 2004.

Selama kuliah, ia mengejar pengetahuan dalam berbagai aspek ekonomi dan aktif sebagai aktivis ekonomi yang kemudian menjadi dasar pemahamannya yang kuat tentang disiplin ilmu ini. S2 Ekonomi di Universitas Trisakti Jakarta (2010): Setelah meraih gelar S1, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan tinggi dengan mengambil gelar S2 di bidang Ekonomi Syariah. Pada tahun 2010-2012, ia berhasil menyelesaikan program S2-nya di salah satu perguruan tinggi terkemuka di Universitas Trisakti. Di sinilah ia semakin memfokuskan penelitiannya pada ekonomi Islam. S3 Ekonomi Syariah di Bogor (2022) lulus Januari 2026. Selama studi S3-nya, ia melakukan penelitian mendalam tentang keterkaitan antara ekonomi dan ajaran Islam dan konvensional, tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan aktif menjadi Komisaris di beberapa perusahaan. Penulis memiliki kepakaran di bidang ekonomi Islam dan *digital marketing* untuk mewujudkan karier sebagai dosen

profesional dan praktisi bekerja di perbankan swasta. Saat ini mengajar di STIES Gasantara Sukabumi, Universitas Islam Depok, dan Universitas Pamulang.

Email: oemarmogie@gmail.com

BAB 5

**PERTUMBUHAN EKONOMI
INDONESIA: FAKTOR
PENDORONG DAN
JEBAKAN PENDAPATAN
MENENGAH (*MIDDLE-
INCOME TRAP*)**

Akhmad Solikin, S.E., M.A., Ph.D.
Politeknik Keuangan Negara STAN



Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran ekonomi yang sangat penting. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa pada suatu periode tertentu. Periode yang dimaksud bisa tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Karena kapasitas produksi diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau untuk tingkat provinsi atau kabupaten/kota diukur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka pertumbuhan ekonomi diukur dengan persentasi peningkatan PDB dari satu periode ke periode lainnya.

Dulu pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran utama untuk melihat perkembangan ekonomi atau keberhasilan pembangunan. Saat ini, ukuran tersebut telah disempurnakan dan diintegrasikan dengan konsep yang lebih luas, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, SDGs), sebagai kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Millenium (*Millennium Development Goals*, MDGs). Pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan SDGs ke-8 dari 17 SDGs, yang berbunyi “Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi”. Oleh karena itu, pengembangan SDGs tidak mengurangi pentingnya pembahasan tentang pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran ekonomi yang utama. Sebagai contoh, pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro, yang ditargetkan sebesar 5,4% dimana pertumbuhan tersebut diharapkan ditopang oleh konsumsi, investasi, ekspor, dan transformasi berkelanjutan (Kementerian Keuangan, 2025).

Bab ini akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya terkait tentang faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, baik ditinjau dari sisi teori maupun dari sejarah. Selanjutnya, bab ini juga akan membahas strategi agar pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dan kebijakan ekonomi lain untuk membantu Indonesia keluar dari jebakan negara pendapatan menengah (*Middle Income Trap*).

Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sebagaimana disajikan pada Grafik 1, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2001-2025 berkisar pada angka 3,6 persen sampai dengan 6,3 persen. Anomali terjadi pada tahun 2020 yang

tumbuh minus 2,1 persen karena pandemi Covid-19. Kisaran pertumbuhan ekonomi sebesar itu tidak akan cukup untuk mencapai Indonesia Emas 2045, di mana pemerintahan Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2029 sebesar 8 persen (Harefa, 2025). Dari mana tambahan sumber pendorong pertumbuhan ekonomi?

1. Inspirasi dari Teori Pertumbuhan Ekonomi

Merujuk pada berbagai teori pertumbuhan ekonomi, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut (Amalia dkk., 2022; Sattar, 2017):

- a. Teori klasik menekankan peran dari penduduk atau tenaga kerja dan modal dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi dengan nilai tambah yang semakin rendah (*diminishing marginal returns*).
- b. Teori neoklasik menekankan pentingnya teknologi dan peningkatan produktivitas pekerja lewat penggunaan teknologi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh pasar, dengan peran pemerintah yang relatif terbatas untuk mendukung pasar.
- c. Teori Keynesian memandang bahwa dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh permintaan agregat (*aggregate demand*) dan bahwa pasar seringkali menyebabkan ketidakstabilan (*instability*), ketidakmerataan (*inequality*) dan inefisiensi (karena adanya kegagalan pasar) sehingga teori ini menekankan pentingnya peran pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.



Grafik 5.1: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%)

Sumber: BPS (berbagai tahun)

Daftar Pustaka

- Amalia, F., Sinaga, R., Asyari, Soeyatno, R. F., Silitonga, D., Solikin, A., Hubbansyah, A. K., Siregar, R. T., Maulina, D., Kusumaningrum, R., Sahamony, N. F., Litriani, E. & Ladjin, N. (2022). *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- BPS. (2019). *Statistik Indonesia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2020). *Statistik Indonesia 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2026). *Statistik Indonesia 2026*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Garnaut, R. (2015). Indonesia's resource boom in international perspective: Policy dilemmas and options for continued strong growth. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(2), 189-212.
- Glawe, L. & Wagner, H. (2016). The middle-income trap: definitions, theories and countries concerned – A literature survey. *Comparative Economic Studies*, 58, 507-538.
- Harefa, M. (2025). Upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen. *Parliamentary Review*, 7(1), 11-19.
- Kementerian Keuangan. (2025). *Advertorial RAPBN 2026: Kedaulatan Pangan, Energi dan Ekonomi*. Jakarta: DJA Kementerian Keuangan.
- Kuncoro, M. (2009). *Ekonomika Indonesia: Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Musyawwiri, A. & Üngör, M. (2019). An overview of proximate determinants of economic growth in Indonesia since 1960. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(2), 213-217.
- Nguyen, M. T. (2021). The Middle Income Trap: A case study of Korea and lessons for Vietnam. *VNU Journal of Science: Policy and Management Studies*, 37(2), 93-105.
- Prabowo, R. (2025). Kontribusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. *Factory: Jurnal Industri, Manajemen, dan Rekayasa Sistem Industri*, 3(2), 55-57.
- Prasetiani, D. N., Anindya, H. F. & Yoshe, A. S. (2024). Strategi menghadapi Middle Income Trap: Dampak hilirisasi mineral

- terhadap pendapatan negara Indonesia era Joko Widodo. *Indonesia Foreign Policy Review*, 11(1), Article 37.
- Sattar. (2017). *Buku Ajar Perekonomian Indonesia*. Sleman: Deepublish.
- Shinta, I. C. & Solikin, A. (2022). The influence of capital efficiency and education spending on Indonesia's economic growth. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(2), 1160-1175.
- Sudrajat, Y., Basmar, E., Surachman, A. E., Sirojudin, H. A., Solihin, I., Solikin, A., Zulfidar, F., Annas, M., Pekerti, R. D., Yuliastuti, H., Meliana, de Fretes, A. V. C., Ummah, R. A., Ramdani, E. A., Hidayati, U. & Dharwiyanti, S. (2024). *Perekonomian Indonesia*. Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Sutjipto, H., Didu, S., Ginanjar, R. A. F., Chendrawan, T. S. & Kustanto, A. (2026). Control of corruption and economic growth in developing ASEAN countries. *Economic Thought*, 71(2), 300-329.
- van der Eng, P. (2010). The sources of long-term economic growth in Indonesia, 1880-2008. *Explorations in Economic History*, 47(3), 294-309.
- World Bank. (2024). *World Development Report 2024: The Middle-Income Trap*. Washington; World Bank Group.

PROFIL PENULIS



Akhmad Solikin, S.E., M.A., Ph.D.

Penulis adalah dosen Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN), BPPK, Kementerian Keuangan. Alumni D3 STAN (1995), S1 PE FEUI (1999), S2 Hiroshima University (2004), dan S3 Ruhr-University Bochum, Jerman (2015). Memperoleh sertifikat CA (Chartered Accountant) dari IAI dan CPFM (Certified Public Finance Management) dari ACCA. Pengalaman

bekerja di Kementerian Keuangan sebagai staf dan pejabat struktural di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dan PKN STAN. Sebagai dosen di PKN STAN, mengajar matakuliah Keuangan Publik, Perekonomian Indonesia, Pengantar Ilmu Ekonomi, Ekonomi Mikro, Ekonomi Mikro dan Pengambilan Keputusan, Ekonomi Makro, Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal, Sistem dan Kebijakan Sektor Keuangan, Metode Penelitian, Manajemen, Manajemen Keuangan, serta Etika dan Antikorupsi. Minat penelitian meliputi kebijakan fiskal, ekonomi/keuangan publik, ekonomi pembangunan, serta isu keberlanjutan. Selain itu, minat pengabdian masyarakat antara lain tentang pendampingan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Merah Putih.

Email penulis: akhsol@pknstan.ac.id



BAB 6

KETIMPANGAN PENDAPATAN, KOEFISIEN GINI, DAN STRATEGI PERTUMBUHAN INKLUSIF

Dr. Ir. Mochamad Heru Riza Chakim, M.M.
Universitas Raharja



Pendahuluan

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu isu penting dalam ekonomi pembangunan karena menunjukkan sejauh mana hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui kemampuan mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat (M. P. Todaro & Smith, 2021).

Dalam konteks Indonesia, ketimpangan tidak hanya terjadi pada distribusi pendapatan, tetapi juga dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, teknologi, dan kesempatan ekonomi. Perbedaan tingkat pembangunan antarwilayah, urbanisasi, serta konsentrasi aktivitas ekonomi di daerah tertentu menjadi faktor yang memengaruhi munculnya kesenjangan tersebut (Hill & Narjoko, 2023).

Berbagai teori ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa ketimpangan sering muncul sebagai bagian dari proses transformasi ekonomi. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik, ketimpangan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, memperlambat pengurangan kemiskinan, dan menurunkan kualitas pembangunan manusia (Bank, 2024).

Oleh karena itu, pembangunan modern semakin menekankan pentingnya pertumbuhan inklusif, yaitu pertumbuhan yang tidak hanya meningkatkan output ekonomi tetapi juga memperluas kesempatan dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (OECD, 2023).

Konsep dan Teori Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu isu utama dalam ekonomi pembangunan karena berkaitan dengan distribusi hasil pembangunan di dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan sehingga sebagian kelompok masyarakat dapat menikmati manfaat pembangunan lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui

peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga melalui kemampuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan secara merata (M. P. Todaro & Smith, 2021).

Dalam konteks pembangunan modern, ketimpangan dipandang sebagai fenomena multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, teknologi, modal, dan kesempatan ekonomi. Ketimpangan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang, memperlambat pengurangan kemiskinan, serta menurunkan mobilitas sosial masyarakat (Tian & Xiang, 2024).

1. Definisi Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan (*income inequality*) adalah kondisi ketika distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat tidak berlangsung secara merata sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah. Ketimpangan dapat terjadi antarindividu, antarrumah tangga, antarkelompok sosial, maupun antarwilayah (Smith, 2024).

Menurut Todaro and Smith (2021), ketimpangan mencerminkan perbedaan kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi, pendidikan, keterampilan, dan aset produktif yang menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, ketimpangan tidak hanya berkaitan dengan jumlah pendapatan yang diterima, tetapi juga kesempatan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2. Ketimpangan dalam Perspektif Ekonomi Pembangunan

Dalam ekonomi pembangunan, ketimpangan sering dikaitkan dengan proses transformasi struktural yang terjadi selama pembangunan berlangsung. Pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi biasanya terkonsentrasi pada sektor dan wilayah tertentu sehingga manfaat pembangunan belum dinikmati secara merata. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan pendapatan cenderung meningkat sebelum akhirnya menurun apabila proses pembangunan semakin inklusif (Gibson, 2025; Zhuang et al., 2014).

Daftar Pustaka

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty. *ASEAN ECONOMIC BULLETIN*. <https://doi.org/10.1355/ae29-2j>
- Bank, W. (2024). *Poverty, Prosperity and Planet Report 2024*. World Bank.
- Becker, G. S. (2018). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. University of Chicago Press. *Evanston, IL*.
- Capello, R. (2023). Regional economics. In *Dictionary of Ecological Economics: Terms for the New Millennium*. <https://doi.org/10.4337/9781788974912.R.19>
- Cobham, A., & Sumner, A. (2023). Global Distribution and Inequality Measurement. *Development Policy Review*, 41(2), 145–162.
- Gibson, J. (2025). Poverty and Inequality in Asia and the Pacific. In *Asian Development Review*. <https://doi.org/10.1142/S0116110525010012>
- Harsono, I., Pasalbessy, V. F., & Latuheru, A. (2025). Local Economic Empowerment: A Strategy to Reduce Economic Inequality in Regions. *MSJ: Majority Science Journal*. <https://doi.org/10.61942/msj.v3i2.320>
- Hill, H., & Narjoko, D. (2023). *The Indonesian Economy: Development and Challenges*. ISEAS Publishing.
- ILO. (2024). World Employment and Social Outlook: September 2024 Update. In *World employment and social outlook*.
- Jenkins, S. P. (2021). Inequality Comparisons with Ordinal Data. *Review of Income and Wealth*. <https://doi.org/10.1111/roiw.12489>
- Kalmijn, W., & Veenhoven, R. (2005). Measuring inequality of happiness in nations: In search for proper statistics. In *Journal of Happiness Studies*. <https://doi.org/10.1007/s10902-005-8855-7>
- Kaplaner, C., & Steinebach, Y. (2022). Why We Should Use the Gini Coefficient to Assess Punctuated Equilibrium Theory. *Political Analysis*. <https://doi.org/10.1017/pan.2021.25>

- Mayhew, K., & Wills, S. (2019). *Inequality: An assessment*. *Oxford Review of Economic Policy*. <https://doi.org/10.1093/oxrep/grz009>
- Mu, D. (2025). Decomposing inter-factor associations: a new Shapley approach based on Theil index. *Applied Economics Letters*. <https://doi.org/10.1080/13504851.2025.2462720>
- OECD. (2023). *Inclusive Growth Review 2023*. OECD Publishing.
- Piketty, T. (2022). A Brief History of Equality. In *A Brief History of Equality*. <https://doi.org/10.4159/9780674275898>
- Programme), U. (United N. D., Programme), U. (United N. D., & Programme), U. (United N. D. (2024). Human Development Report 2023-24 PT – Journal Article. *UNDP (United Nations Development Programme)*.
- Rank, M. (2023). Strengthening the Social Safety Net. In *Confronting Poverty: Economic Hardship in the United States*. <https://doi.org/10.4135/9781544358895.n15>
- Ray, D. (2023). *Development Economics*. Princeton University Press.
- Ray, D., & Bell, C. (2018). *Development Economics*. In *The New Palgrave Dictionary of Economics, Third Edition*. https://doi.org/10.1057/978-1-349-95189-5_292
- Saher, L., Tabák, L., Lyeonov, S., & Vasa, L. (2024). Inclusive growth: Literature review. *Journal of International Studies*. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2024/17-1/12>
- Sen, A. (2022). Inclusive growth. *Journal of Social and Economic Development*. <https://doi.org/10.1007/s40847-022-00227-8>
- Sitthiyot, T., & Holasut, K. (2021). A simple method for estimating the Lorenz curve. *Humanities and Social Sciences Communications*. <https://doi.org/10.1057/s41599-021-00948-x>
- Smith, M. N. (2024). The Road to Freedom: Economics and the Good Society. *South African Journal of International Affairs*. <https://doi.org/10.1080/10220461.2025.2459693>
- Statistik, B. P. (2025). *Profil Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Tahun 2025*. BPS.

- Stiglitz, J. E. (2024). *The Road to Freedom: Economics and the Good Society*. W. W. Norton & Company.
- Svensson, A. (2024). A brief history of equality. *Scandinavian Economic History Review*.
<https://doi.org/10.1080/03585522.2022.2154834>
- Tian, L., & Xiang, Y. (2024). Does the digital economy promote or inhibit income inequality? *Heliyon*.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e33533>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). *Economic Development* (13th ed.). Pearson.
- Todaro, M., & Smith, S. C. (2015). Economic Development. In Economic Development. *Essex Pearson Education Limited*.
- UNDP, H. D. R. O., & Conceicao, P. (2024). Human Development Report 2023/24. Breaking the Gridlock: Reimagining Cooperation in a Polarized World. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.4934148>
- Zaid Khoiri, A., Reza Pahlawan, E., & Humaira Samara, F. (2022). Ketimpangan Pendapatan di Indonesia: Pendekatan Data Panel 2016-2020. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia*.
- Zhuang, J., Kanbur, R., & Rhee, C. (2014). Inequality in Asia and the Pacific: Trends, drivers, and policy implications. In *Inequality in Asia and the Pacific: Trends, Drivers, and Policy Implications*.

PROFIL PENULIS



Dr. Ir. Mochamad Heru Riza Chakim, M.M.

Ketertarikan penulis terhadap EKONOMI PEMBANGUNAN INDONESIA: Teori, Kebijakan Kontemporer, dan Tantangan Struktural diawali dari pemahaman bahwa ketimpangan pendapatan merupakan salah satu isu penting dalam ekonomi pembangunan karena menunjukkan sejauh mana hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat.

Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui kemampuan mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Pada saat sekolah SD Negeri Sultan Agung Ponorogo lulus tahun 1973. Tahun 1975 lulus dari SMP Negeri 1 Ponorogo, dan tahun 1979 lulus dari SMA Negeri I Ponorogo. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung 1985. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Manajemen di prodi Magister Bisnis Administrasi Teknologi Institut Teknologi Bandung, lulus tahun 1999, sesuai harapan saya di bidang manajemen, serta pendidikan doctoral di prodi Bisnis Administrasi Universitas Padjadjaran, lulus tahun 2021.

Penulis memiliki kepakaran di bidang strategi korporat dan bisnis korporat. Pada tahun 2014, penulis diangkat menjadi Direktur Komersial PT SUCOFINDO (Persero) di bidang jasa yang sangat tergantung pada SDM yang kompeten. Saat ini penulis juga mengelola Yayasan Sosial Abdul Chakim yang bergerak di bidang Pendidikan dan Sosial, Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Perguruan Tinggi Manajemen Retail Indonesia (APTMRI), Dewan Pembina Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Staf Ahli Pimpinan Universitas Raharja, Asesor LSP Kimia Industri serta menjadi Ketua Bidang Pendidikan di Yayasan Masjid As Sajadah, dosen di Universitas Raharja dan Universitas Padjadjaran. Penulis aktif melakukan penelitian dan juga diterbitkan pada jurnal nasional maupun internasional. Email Penulis: heruriza11@gmail.com

BAB 7
DINAMIKA
KETENAGAKERJAAN,
PENGANGGURAN
STRUKTURAL, DAN
BONUS DEMOGRAFI

Nurlaila Hanum, S.E., M.Si.
Universitas Samudra



Pendahuluan

Pembangunan ekonomi pada dasarnya tidak hanya ditunjukkan oleh peningkatan produk domestik bruto, tetapi juga oleh kemampuan perekonomian menciptakan pekerjaan yang produktif, layak, dan berkelanjutan. Tenaga kerja menjadi penghubung antara pertumbuhan dan kesejahteraan karena kualitas pekerjaan memengaruhi pendapatan, produktivitas, perlindungan sosial, serta peluang seseorang untuk meningkatkan kompetensinya. Oleh sebab itu, analisis ketenagakerjaan perlu melihat bukan hanya berapa banyak orang yang bekerja, melainkan juga mutu pekerjaan yang tersedia dan pemerataan manfaat pembangunan (Todaro & Smith, 2020).

Indonesia menghadapi pertumbuhan angkatan kerja, dominasi pekerjaan informal, kesenjangan kesempatan antardaerah, serta perubahan kebutuhan kompetensi akibat digitalisasi dan otomatisasi. Perubahan struktur ekonomi menggeser permintaan tenaga kerja dari kegiatan tradisional menuju industri, jasa modern, dan pekerjaan berbasis teknologi. Ketika pendidikan dan pelatihan tidak mampu mengikuti perubahan tersebut, lowongan kerja dapat tersedia bersamaan dengan tingginya jumlah pencari kerja. Kondisi ini menunjukkan pengangguran struktural yang tidak cukup diselesaikan melalui pertumbuhan ekonomi jangka pendek (Borjas, 2020; ILO, 2024).

Pada saat yang sama, besarnya proporsi penduduk usia produktif membuka peluang bonus demografi. Peluang ini dapat memperkuat produksi, tabungan, investasi, konsumsi, inovasi, dan basis penerimaan negara. Namun, manfaat tersebut tidak muncul dengan sendirinya. Kualitas pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja produktif, mobilitas tenaga kerja, serta keterpaduan kebijakan pembangunan menentukan apakah perubahan struktur umur penduduk benar-benar menghasilkan keuntungan ekonomi (Bloom, Canning, & Sevilla, 2003). Bab ini membahas keterkaitan antara dinamika ketenagakerjaan, pengangguran struktural, dan bonus demografi, kemudian merumuskan arah kebijakan yang relevan bagi pembangunan Indonesia menuju 2045.

Konsep dan Teori Ketenagakerjaan dalam Ekonomi

1. Tenaga Kerja, Angkatan Kerja, dan Pasar Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan mencakup hal-hal yang berkaitan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, termasuk pendidikan, penempatan, hubungan kerja, perlindungan, dan jaminan sosial. Dalam statistik Indonesia, penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas. Kelompok ini dibedakan menjadi angkatan kerja, yaitu penduduk yang bekerja dan penganggur, serta bukan angkatan kerja, antara lain penduduk yang bersekolah atau mengurus rumah tangga. Pasar tenaga kerja mempertemukan penawaran tenaga kerja dari rumah tangga dengan permintaan dari perusahaan dan organisasi. Tingkat upah berperan sebagai harga, tetapi perekrutan juga dipengaruhi produktivitas, teknologi, permintaan, regulasi, informasi, dan mobilitas tenaga kerja (Republik Indonesia, 2003; BPS, 2026; Mankiw, 2021).

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, tenaga kerja tidak hanya dipandang sebagai faktor produksi, tetapi juga sebagai modal manusia. Pendidikan, keterampilan, pengalaman, kesehatan, etos kerja, dan kemampuan beradaptasi memengaruhi produktivitas serta pendapatan. Investasi pada modal manusia memperbesar kemampuan individu untuk berpindah ke pekerjaan yang lebih produktif dan meningkatkan kapasitas perekonomian dalam mengadopsi teknologi baru (Becker, 1993).

2. Indikator Ketenagakerjaan

Kondisi pasar kerja diukur melalui beberapa indikator yang saling melengkapi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan persentase penganggur terhadap angkatan kerja. Selain itu, analisis ketenagakerjaan perlu mempertimbangkan tingkat kesempatan kerja, proporsi pekerja formal dan informal, setengah pengangguran, jam kerja, upah, produktivitas, serta cakupan perlindungan sosial. Penggunaan satu indikator saja dapat menghasilkan gambaran yang tidak lengkap.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Proyeksi penduduk Indonesia 2020-2050 hasil Sensus Penduduk 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Keadaan angkatan kerja di Indonesia Februari 2026*. Badan Pusat Statistik.
- Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (Ed. ke-3). University of Chicago Press.
- Blanchard, O. (2021). *Macroeconomics* (Ed. ke-8). Pearson.
- Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2003). *The demographic dividend: A new perspective on the economic consequences of population change*. RAND Corporation.
- Borjas, G. J. (2020). *Labor economics* (Ed. ke-8). McGraw-Hill Education.
- International Labour Organization. (2024). *The skills development and employment situation in Indonesia's electronic sector: Navigating technological changes and labour transitions*. ILO Country Office for Indonesia and Timor-Leste.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2023, November 5). *Bappenas: Anak muda dan bonus demografi untuk capai TPB/SDGs Indonesia*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Lewis, W. A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. *The Manchester School*, 22(2), 139-191.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of economics* (Ed. ke-9). Cengage Learning.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 188.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (Ed. ke-13). Pearson.

World Bank. (2023). *Indonesia: Labor Market Information and Skills System Transformation for Labor Market Flexibility (LISTRAF) Project*. World Bank.

PROFIL PENULIS



Nurlaila Hanum, S.E., M.Si.

Penulis tertarik terhadap ilmu ekonomi dimulai pada tahun 1981 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala dengan memilih Jurusan Ekonomi Pembangunan dan meraih gelar S.E. Penulis kemudian melanjutkan studi S2 pada program studi Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara

pada tahun 2004 dan meraih gelar M.Si. dengan predikat cumlaude.

Penulis aktif mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samudra, Langsa, Aceh, sejak status kampus masih swasta mulai tahun 1988 hingga sekarang status kampus sudah menjadi perguruan tinggi negeri. Penulis mengampu mata kuliah teori ekonomi mikro, ekonomi makro dan ekonomi kependudukan pada program studi ekonomi pembangunan. Penulis pernah menjabat sebagai sekretaris Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Penulis juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai kontribusi dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi. Selain itu penulis juga tertarik untuk menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi kemajuan pengetahuan terutama di bidang ekonomi.

Email Penulis: nurlailahanum123@gmail.com

BAB 8

**SEKTOR JASA, UMKM,
DAN PERANNYA
SEBAGAI PENOPANG
EKONOMI DOMESTIK**

Gautama Sastra Waskita, S.E., B.BA., M.M.
Universitas Tulungagung



Sektor Jasa dan UMKM: Fondasi Baru Ekonomi Indonesia

Pagi hari dimulai dengan membuka ponsel. Dalam hitungan detik, secangkir kopi sudah dipesan melalui aplikasi, pembayaran dilakukan secara digital, kurir menerima notifikasi pengantaran, dan ulasan pelanggan akan menentukan apakah sebuah kedai memperoleh pelanggan baru pada hari berikutnya. Siang harinya, seorang mahasiswa menjual desain digital melalui platform *freelance*, sementara temannya melakukan siaran langsung (*live shopping*) untuk memasarkan produk fesyen lokal. Malam harinya, seorang kreator konten memperoleh pendapatan dari kolaborasi merek, dan seorang pemilik usaha mikro menerima pesanan dari pelanggan di kota lain tanpa pernah bertemu secara langsung.

Rangkaian aktivitas tersebut terasa begitu biasa bagi Generasi Z. Namun, di balik rutinitas digital yang tampak sederhana, sesungguhnya sedang berlangsung sebuah perubahan besar dalam cara ekonomi bekerja. Nilai ekonomi tidak lagi hanya lahir dari pabrik-pabrik besar atau aktivitas produksi barang dalam skala masif. Nilai justru semakin banyak diciptakan melalui layanan, pengalaman pelanggan, kreativitas, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi digital (Gulo et al., 2025; Widhajati et al., 2025). Barang tetap penting, tetapi yang membedakan sebuah produk dari produk lainnya sering kali bukan lagi bentuk fisiknya, melainkan kualitas layanan, kemudahan akses, kecepatan respons, serta pengalaman yang dirasakan pelanggan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa dunia sedang memasuki era ketika ekonomi berbasis layanan (*service economy*) menjadi penggerak utama pertumbuhan. Pergeseran ini tidak hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi juga berlangsung secara nyata di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Transformasi tersebut mengubah cara perusahaan menciptakan keunggulan kompetitif, cara masyarakat bekerja, hingga cara generasi muda membangun karier dan usaha. Jika dahulu kesuksesan ekonomi identik dengan kepemilikan aset fisik dan kapasitas produksi, kini keberhasilan semakin ditentukan oleh kemampuan menciptakan nilai (*value creation*) melalui pengetahuan, inovasi, pengalaman pelanggan, dan pemanfaatan teknologi digital (Kraus et al., 2022).

Perubahan tersebut sejalan dengan transformasi struktur ekonomi yang telah berlangsung selama beberapa dekade terakhir. Pada tahap awal pembangunan, sebagian besar aktivitas ekonomi Indonesia bertumpu pada sektor pertanian dan eksploitasi sumber daya alam. Seiring meningkatnya industrialisasi, sektor manufaktur berkembang sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Memasuki era digital, pola tersebut mengalami pergeseran menuju ekonomi berbasis jasa yang didukung oleh teknologi informasi, ekonomi kreatif, layanan digital, serta berbagai bentuk inovasi berbasis pengetahuan. Pergeseran ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi modern tidak lagi hanya berorientasi pada peningkatan *output* produksi, tetapi juga pada kemampuan menciptakan nilai tambah melalui pelayanan dan inovasi.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, transformasi menuju dominasi sektor jasa merupakan karakteristik yang umum dijumpai pada negara-negara yang mengalami peningkatan pendapatan dan produktivitas. Meningkatnya tingkat pendidikan, urbanisasi, digitalisasi, dan perubahan preferensi konsumen mendorong permintaan terhadap layanan yang semakin beragam, mulai dari jasa pendidikan, kesehatan, keuangan, logistik, pariwisata, teknologi informasi, hingga ekonomi kreatif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sektor jasa tidak lagi dipandang sebagai sektor pelengkap, melainkan sebagai fondasi baru yang menopang aktivitas ekonomi nasional sekaligus meningkatkan daya saing suatu negara di tingkat global (Brezzi et al., 2021).

Indonesia merupakan salah satu contoh menarik dari transformasi tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan berbagai layanan digital berkembang sangat pesat. Ekosistem *e-commerce*, pembayaran digital, *financial technology* (*fintech*), transportasi daring, konsultasi berbasis digital, pendidikan daring, hingga industri kreatif telah mengubah pola konsumsi masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi jutaan pelaku usaha. Digitalisasi tidak hanya memperluas akses pasar, tetapi juga menurunkan berbagai hambatan yang sebelumnya membatasi pelaku usaha mikro untuk bersaing secara lebih luas. Bahkan, sebuah usaha rumahan kini memiliki peluang yang sama untuk menjangkau

Daftar Pustaka

- Ahn, K.-H. (2024). Main contents and implications of the 2023 revision of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises. *Journal of International Logistics and Trade*, 22(2), 80–92.
- Annex, I. (2024). 2024 UNCTAD survey on the creative economy: National agencies and strategies. *Policy*, 2021, 2035.
- Ashari, D. R. W., Gulo, N., Hadikusumo, R. A., Dewi, M., Chakim, M. H. R., Noerhatini, P., Zati, M. R., Milzam, M., Martha, D., & Maulidizen, A. (2025). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Sada Kurnia Pustaka.
- Ashari, D. R. W., Sartono, S., Subagyo, B., Waskita, G. S., & Santoso, E. (2026). Building Entrepreneurial Capabilities through Co-Creation Multiformat Branding and Omnichannel Marketing. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 238–249.
- Ashari, D. R. W., & Waskita, G. S. (2025). Sustainability Business Strategy in the Era of VUCA. *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 5(1), 33–49.
- Ashari, D. R. W., & Waskita, G. S. (2026). The Art of Doing More with Less: Exploring Frugal Innovation Practices as Strategic Agility Drivers in SMEs. *SINDA Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 5(2), 71–82.
- Ashari, D. R. W., Waskita, G. S., Bakti, N. S., Rizkaputra, F. A., & Rahmawati, D. (2026). Platform-Driven Operations: Rethinking Supply Chain Dynamics in Affiliate-Based Digital Ecosystems. *Journal of Development Research*, 10(1), 135–143. <https://doi.org/10.28926/jdr.v10i1.525>
- Brezzi, M., González, S., Nguyen, D., & Prats, M. (2021). An updated OECD framework on drivers of trust in public institutions to meet current and future challenges. *OECD Working Papers on Public Governance*, (48), 0-1-60.
- Davidsson, P., Achtenhagen, L., & Naldi, L. (2013). Towards an integrative framework for future research on small firm growth. In *New Perspectives on Firm Growth*. Edward Elgar Publishing.

<https://doi.org/10.4337/9780857933614.00015>

- Dwivedi, Y. K., Kshetri, N., Hughes, L., Slade, E. L., Jeyaraj, A., Kar, A. K., Baabdullah, A. M., Koohang, A., Raghavan, V., Ahuja, M., Albanna, H., Albashrawi, M. A., Al-Busaidi, A. S., Balakrishnan, J., Barlette, Y., Basu, S., Bose, I., Brooks, L., Buhalis, D., ... Wright, R. (2023). Opinion Paper: “So what if ChatGPT wrote it?” Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy. *International Journal of Information Management*, 71, 102642. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642>
- Eldon, M., Alifatun, R., Ashari, D. R. W., Rifa'i, A., & Waskita, G. S. (2025). The Future of Banking in The Technology Era: Digital Transformation and Implications. *INTERNATIONAL SEMINAR*, 7, 869–886.
- Eldon, M., Ashari, D. R. W., & Waskita, G. S. (2025). The Rise of Greenfluencers: Micro-Influencer Impact on Sustainable Product Purchase Intentions. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 13(01).
- Eldon, M., & Waskita, G. S. (2024). Strategy for Improving MSMEs Through The Use of Digital Marketing During Society 5.0 and The Industrial Revolution 4.0 Era. *International Seminar Universitas Tulungagung 2024*, 6(2024), 823–832.
- Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. (2017). The Circular Economy – A new sustainability paradigm? *Journal of Cleaner Production*, 143, 757–768. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.048>
- Gulo, N., Ihsan, A. M. N., Eldon, M., Sangadah, H. A., Waskita, G. S., Lestari, D. F., Julaeha, L. S., Chakim, M. H. R., Devila, R., & Rachmadi, K. R. (2025). *Manajemen Hubungan Pelanggan (Customer Relationship Manajemen)*.
- Jatmiko, U., Eldon, M., & Waskita, G. S. (2026). How Does Digital Agility Enhance Entrepreneurial Performance? A Socio-Technical Perspective on Digital Transformation. *Proceeding of SINERGY*, 1(1), 427–443.

- Khilukha, O. (2024). Digital *economy*: Trends, challenges, and development prospects. *Economic Forum*, 14(4), 65–72.
- Kohtamäki, M., Parida, V., Oghazi, P., Gebauer, H., & Baines, T. (2019). Digital servitization business models in ecosystems: A theory of the firm. *Journal of Business Research*, 104, 380–392. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.06.027>
- Kraus, S., Durst, S., Ferreira, J. J., Veiga, P., Kailer, N., & Weinmann, A. (2022). Digital transformation in business and management research: An overview of the current status quo. *International Journal of Information Management*, 63, 102466. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102466>
- Lemon, K. N., & Verhoef, P. C. (2016). Understanding Customer Experience Throughout the Customer Journey. *Journal of Marketing*, 80(6), 69–96. <https://doi.org/10.1509/jm.15.0420>
- Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (2013). The *experience economy*: Past, present and future. In *Handbook on the Experience Economy*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781781004227.00007>
- Sartono, S., Waskita, G. S., & Arintowati, D. (2023). Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Budaya Organisasional Terhadap Kinerja Guru Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening. *BEMJ: Business, Entrepreneurship, and Management Journal*, 2(1), 36–45.
- Teece, D. J. (2018). Business models and dynamic capabilities. *Long Range Planning*, 51(1), 40–49. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2017.06.007>
- Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2017). Service-dominant logic 2025. *International Journal of Research in Marketing*, 34(1), 46–67. <https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2016.11.001>
- Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Qi Dong, J., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889–901.

<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022>

- Waskita, G. S., Ashari, D. R. W., Al Haris, M. B., Rifa'i, A., & Eldon, M. (2024). Integrating Sustainable Development Goals into Coffee Shop Operations: Insights from Kedai Kosim, Indonesia. *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 4(3), 243–252.
- Waskita, G. S., Ashari, D. R. W., Al Haris, M. B., Rifa'i, A., & Izzah, S. (2026). Value Co-Creation in The Gig Economy: Phenomenological Study of Micro Entrepreneurs in Emerging Indonesian Creative Hubs. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 7(1), 58–69. <https://doi.org/10.34306/54g0he22>
- Waskita, G. S., Damayanti, L. A., & Sartono, S. (2026). Strengthening Entrepreneurial Capacity Through Structured Business Ideation and Incubation: A Community Engagement Model. *JANITA: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 6(1), 67–80.
- Waskita, G. S., Widi Ashari, D. R., Izzah, S., Rahmawati, D., & Permadi, A. (2026). Pentahelix Collaboration for MSME Entrepreneurship Ecosystem Development during National Santri Day. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 224–237. <https://doi.org/10.34306/adimas.v6i2.1463>
- Widhajati, E., Waskita, G. S., & Rahmawati, D. (2025). A Public-Driven Marketplace for Sustainable Micro-Entrepreneurship: Exploring Value Co-Creation in Tulungagung's Car-Free Day Business Ecosystem. *Proceedings International Seminar Tulungagung University*, 7, 1174–1184. <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/pxrmnn50>

PROFIL PENULIS



Gautama Sastra Waskita, S.E., B.BA., M.M.

Penulis adalah akademisi, peneliti, dan praktisi bisnis yang dikenal atas kontribusinya di bidang *entrepreneurial management*, *green marketing strategy*, dan *sustainable business*. Sebagai dosen bisnis & kewirausahaan di Universitas Tulungagung-Indonesia, ia juga menjabat sebagai Koordinator Program Inkubator

Bisnis, tempat ia membimbing mahasiswa dan pelaku usaha untuk menciptakan inovasi bisnis yang berdampak sosial dan lingkungan.

Berlatar belakang pendidikan dari President University melalui *international full scholarship program* pada studi *Hospitality & Tourism Business* dan Magister Manajemen dari Universitas Islam Kadiri pada studi Manajemen Pemasaran, Gautama memiliki kombinasi unik antara keahlian akademis dan pengalaman praktis. Melalui forum nasional dan internasional, ia menyampaikan pemikiran strategis dan analisis mendalam mengenai perencanaan bisnis, implementasi strategi pemasaran hijau, serta keberlanjutan usaha dalam menghadapi dinamika pasar global.

Sebagai pendiri *Satya Entrepreneur*, Gautama berkomitmen memberdayakan UMKM dan start-up melalui konsultasi strategis dan pelatihan kewirausahaan. Pengalamannya sebagai *Indonesia Certified Barista* menambah dimensi unik dalam kariernya, mengintegrasikan seni kopi dengan manajemen bisnis yang profesional.

Di luar peran akademisnya, Gautama aktif menyelenggarakan seminar dan workshop, serta menjalankan bisnis kopi berbasis *partnership*. Dengan visi menginspirasi generasi muda untuk menciptakan usaha berkelanjutan, Gautama Sastra Waskita menjadi salah satu figur kunci dalam ekosistem kewirausahaan di Indonesia.

Korespondensi Penulis:

sastrawaskita@gmail.com / +62 899-007-1922

BAB 9
DAMPAK
DESENTRALISASI
FISKAL DAN OTONOMI
DAERAH TERHADAP
PEMERATAAN
PEMBANGUNAN

Ahmad Nashiruddin Mushoddiq Rahman, S.Pd., M.Ak.
Universitas Negeri Makassar



Pendahuluan

Pembangunan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan, tetapi juga dengan kemampuan mendistribusikan manfaat pembangunan secara lebih merata antar daerah dan antar kelompok masyarakat. Bagi Indonesia, tujuan tersebut menghadapi tantangan yang besar karena setiap wilayah memiliki kondisi geografis, struktur ekonomi, infrastruktur, kapasitas fiskal, dan kualitas kelembagaan yang berbeda. Perbedaan titik awal tersebut memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik serta menciptakan kesempatan ekonomi. Karena itu, pemerataan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari desain hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal secara luas sejak 2001 mengubah pola pembangunan Indonesia. Pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih besar untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan, didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta transfer dari pemerintah pusat. Perubahan ini menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor penting dalam penyediaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pelayanan dasar lainnya. Secara teoretis, pendekatan tersebut didasarkan pada gagasan bahwa pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat memiliki informasi lebih baik mengenai kebutuhan lokal dan karena itu dapat menyediakan pelayanan secara lebih responsif dan efisien (Oates, 1999).

Setelah lebih dari dua dekade, desentralisasi fiskal telah memperluas kapasitas pemerintah daerah, tetapi hasil pembangunan tetap beragam. Peningkatan sumber daya fiskal tidak selalu menghasilkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik yang setara karena kapasitas birokrasi, kualitas perencanaan, komposisi belanja, tata kelola, struktur ekonomi, serta hambatan geografis berbeda antardaerah. Dengan kata lain, pemerataan sumber daya fiskal tidak identik dengan pemerataan hasil pembangunan. Pada September 2025, Gini Ratio nasional tercatat 0,363; namun angka agregat tersebut menyembunyikan variasi yang nyata antara wilayah perkotaan dan perdesaan serta antarkawasan (Badan Pusat Statistik, 2026). El Ashfahany et al. (2020) menemukan bahwa desentralisasi

dapat meningkatkan ketimpangan ketika kapasitas fiskal rendah dan ketergantungan transfer tinggi, sedangkan Siburian (2021) menemukan hubungan dengan penurunan disparitas regional. Farida et al. (2021) menegaskan bahwa di Indonesia Timur hasilnya dibatasi oleh rendahnya belanja produktif dan kapasitas pengelolaan anggaran. Variasi temuan ini menunjukkan bahwa desain transfer, kualitas belanja, institusi, dan karakteristik wilayah menentukan hasil desentralisasi.

Reformasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan arah baru desentralisasi fiskal. Fokus kebijakan tidak lagi berhenti pada distribusi sumber daya, tetapi mencakup penguatan kapasitas penerimaan, pengurangan ketimpangan vertikal dan horizontal, peningkatan kualitas belanja, serta harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Bab ini membahas hubungan antara desentralisasi fiskal dan pemerataan pembangunan melalui kapasitas fiskal, pelayanan publik, pertumbuhan, dan ketimpangan antarwilayah, kemudian mengidentifikasi tantangan struktural dan arah penguatan kebijakan.

Desentralisasi Fiskal dan Pemerataan Pembangunan: Konsep dan Pengembangan Kebijakan

Desentralisasi fiskal merupakan pembagian kewenangan antartingkat pemerintahan dalam memperoleh pendapatan, menentukan pengeluaran, mengelola transfer, dan membiayai pelayanan publik. Karena itu, desentralisasi bukan sekadar memindahkan dana dari pusat ke daerah, tetapi juga mengatur hubungan antara kewenangan, tanggung jawab pelayanan, sumber pembiayaan, dan akuntabilitas. Dalam kerangka *fiscal federalism*, pemerintah pusat lebih tepat menangani fungsi stabilisasi makroekonomi, redistribusi, dan barang publik nasional, sedangkan pemerintah daerah memiliki keunggulan dalam pelayanan yang kebutuhannya berbeda antarwilayah (Oates, 1999).

Prinsip tersebut berhubungan dengan *Decentralization Theorem*: dalam kondisi tertentu, pelayanan publik lokal dapat lebih efisien apabila disediakan oleh pemerintah yang mampu menyesuaikannya

Daftar Pustaka

- Aji, P., Wibisono, I. D., & Suryahadi, A. (2021). Income, inequality and poverty convergence at the local government level in decentralized Indonesia. *Journal of Southeast Asian Economies*, 38(3), 375–400. <https://www.jstor.org/stable/27096084>
- Badan Pusat Statistik. (2026, February 5). Gini ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2535/gini-ratio-september-2025-tercatat-sebesar-0-363-.html>
- Chattha, M. K., Soko, N. P., Tyas, P., & Fadilla, R. R. (2024, March 22). Improving local tax compliance through point-of-sales devices in Indonesia. *World Bank Blogs*. <https://blogs.worldbank.org/en/developmenttalk/improving-local-tax-compliance-through-point-of-sales-devices-in>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023a, October 10). Implementasi UU HKPD perkuat pengelolaan keuangan daerah. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=42811>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023b, October 17). Siaran pers—Transfer ke daerah 2024 dukung akselerasi transformasi ekonomi. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=43131>
- El Ashfahany, A., Djuuna, R. F., & Rofiq, N. F. (2020). Does fiscal decentralization increase regional income inequality in Indonesia? *Jambura Equilibrium Journal*, 2(2), 68–80. <https://doi.org/10.37479/jej.v2i2.6866>
- Farida, N., Suman, A., & Sakti, R. K. (2021). Fiscal decentralization, economic growth and regional development inequality in Eastern Indonesia. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 9(2), 1–9. <https://doi.org/10.21776/ub.JIAE.2021.009.02.1>
- Hamidi, U. S., & Puspita, D. (Eds.). (2022). Two decades of fiscal decentralization implementation in Indonesia. Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

- Khusaini, K., Sentosa, B. M., & Putro, T. R. (2023). Fiscal transfer policies and road infrastructure reduce income inequality in rural-urban areas. *Etikonomi*, 22(2), 333–356. <https://doi.org/10.15408/etk.v22i2.28618>
- Lewis, B. D. (2023). Indonesia's new fiscal decentralisation law: A critical assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(1), 1–28. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838>
- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149. <https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). Making decentralisation work: A handbook for policy-makers. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/g2g9faa7-en>
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757*.
- Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906*.
- Siburian, M. E. (2021). Fiscal decentralization, regional income inequality, and the provision of local public goods: Evidence from Indonesia. *Journal of Economic Development*, 46(4), 87–103. <https://doi.org/10.35866/caujed.2021.46.4.004>
- Siswidiyanto, & Sahputri, R. A. M. (2023). Decentralisation and human development in Indonesia: The importance of local government capacity in delivering development outputs and *outcomes*. *Lex Localis — Journal of Local Self-Government*, 21(2), 393–419. [https://doi.org/10.4335/21.2.393-419\(2023\)](https://doi.org/10.4335/21.2.393-419(2023))
- Talitha, T., Firman, T., & Hudalah, D. (2020). Welcoming two decades

of decentralization in Indonesia: A regional development perspective. *Territory, Politics, Governance*, 8(5), 690–708. <https://doi.org/10.1080/21622671.2019.1601595>

Vujanovic, P. (2017). Decentralisation to promote regional development in Indonesia (OECD Economics Department Working Papers No. 1380). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/d9cabd0a-en>

World Bank. (2023, October 27). Indonesia: World Bank program to support more efficient local government spending. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/10/27/indonesia-world-bank-program-to-support-more-efficient-local-government-spending>

PROFIL PENULIS



Ahmad Nashiruddin Mushoddiq Rahman, S.Pd., M.Ak.

Lahir di Makassar tahun 1992, penulis memilih kepakaran pada bidang perpajakan dan akuntansi sektor publik. Alumni Universitas Negeri Makassar Program Studi Pendidikan Akuntansi pada tahun 2014 dan melanjutkan pendidikan serta menyelesaikan studi pada tahun 2019 di Program Studi Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia. Berkarir pada Pemerintah Kota Makassar sejak tahun 2012 hingga tahun 2023. Mulai menjadi dosen pada tahun 2023 pada Program Studi Diploma Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar.

Penulis memiliki kepakaran di bidang perpajakan dan akuntansi sektor publik. Dalam perjalanan menuju dosen profesional, penulis mencoba aktif sebagai peneliti dibidang perpajakan dan akuntansi sektor publik. Selain itu, penulis juga bergabung dalam asosiasi perpajakan PERTAPSI (Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia).

Email Penulis: ahmad.nashiruddin@unm.ac.id



BAB 10

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN

Wiljan Atfentia Kotngoran, S.E., M.Si.
Universitas Pattimura



Konsep Definisi Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan

Tujuan fundamental dari pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan semua orang Indonesia, terlepas dari tempat tinggal mereka. Namun, Indonesia menghadapi tugas yang sulit dalam mencapai pembangunan yang adil karena merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau. Hasil pembangunan tidak selalu dibagikan secara merata oleh semua daerah karena keadaan geografis yang beragam, jarak yang jauh antar pulau, dan perbedaan dalam potensi sumber daya. Kata-kata "daerah terbelakang," "daerah perbatasan," dan "daerah kepulauan" muncul dalam konteks ini dan menjadi prioritas kebijakan pembangunan nasional yang signifikan.

Dibandingkan dengan mereka yang berada di pusat pertumbuhan ekonomi, komunitas yang tinggal di lokasi tersebut sering menghadapi kenyataan yang berbeda. Akses ke pasar, layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi masih relatif terbatas. Akibatnya, ada lebih sedikit kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Oleh karena itu, mempromosikan keadilan sosial agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk sejahtera sama pentingnya bagi pembangunan daerah seperti membangun jalan, pelabuhan, atau jaringan listrik.

Secara yuridis, daerah tertinggal merupakan kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Kondisi tersebut diukur berdasarkan berbagai indikator, seperti tingkat perekonomian masyarakat, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, karakteristik wilayah, serta tingkat kerentanan terhadap bencana dan konflik. Definisi ini menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan afirmatif pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan (PP 78 Tahun 2014).

Istilah "daerah terbelakang" merujuk pada lebih dari sekadar pendapatan rendah masyarakat. Bahkan jika suatu lokasi memiliki banyak sumber daya alam, lokasi tersebut masih dianggap

terbelakang jika komunitasnya belum mampu mengubah potensi tersebut menjadi nilai ekonomi. Dengan kata lain, keterbelakangan bukanlah sekadar cerminan dari kurangnya sumber daya, melainkan lebih kepada akses terbatas terhadap pembangunan. Menurut ekonomi pembangunan, disparitas spasial menyebabkan keterbelakangan. Dibandingkan dengan daerah terpencil, daerah dengan konsentrasi aktivitas ekonomi, investasi yang kuat, dan akses transportasi yang mudah biasanya berkembang lebih cepat. Fenomena ini konsisten dengan teori kausal kumulatif Myrdal, yang berpendapat bahwa jika kebijakan pemerintah tidak mengganggu, wilayah-wilayah maju akan terus menarik modal, tenaga kerja terampil, dan investasi, sehingga memperlebar kesenjangan antar wilayah. Dengan menciptakan infrastruktur dasar, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan ekonomi lokal, dan memperkuat konektivitas regional, pemerintah Indonesia bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ini melalui langkah-langkah aksi afirmatif. Sejalan dengan premis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) "tidak ada yang tertinggal," pendekatan pembangunan kini berfokus pada keadilan dan inklusivitas selain kemajuan ekonomi (Bappenas, 2020).

Wilayah yang memiliki perbatasan darat atau maritim langsung dengan negara lain dikenal sebagai daerah perbatasan. Karena lokasi pentingnya, daerah perbatasan berfungsi sebagai gerbang ekonomi yang menghubungkan Indonesia dengan tetangganya dan serambi depan bangsa yang menjaga kedaulatan nasional. Pengembangan wilayah perbatasan sebelumnya terutama dilihat dari sudut pandang keamanan (pendekatan keamanan). Namun, paradigma ini telah berubah menjadi strategi kemakmuran yang memprioritaskan pengembangan masyarakat. Melalui peningkatan konektivitas, perdagangan lintas batas, investasi, dan penyediaan layanan publik yang memadai, komunitas perbatasan diharapkan dapat berkembang menjadi pusat-pusat baru kegiatan ekonomi. Mengingat bahwa daerah perbatasan sering menghadapi masalah seperti infrastruktur yang buruk, logistik yang mahal, akses terbatas ke layanan kesehatan dan pendidikan, serta aktivitas ekonomi yang masih bergantung pada negara tetangga, pengembangan daerah perbatasan menjadi semakin

Daftar Pustaka

- Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2025). *Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Rencana Strategis Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2025–2029*. Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024). *Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Iqbal, L. (2020). Evaluasi *ex ante* kebijakan Dana Khusus Kepulauan (DKK) terhadap ketimpangan alokasi transfer ke daerah. *Bappenas Working Papers*, 3(2). <https://doi.org/10.47266/bwp.v3i2.78> (*tambahkan DOI jika digunakan dalam naskah*).
- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. (2025). *Rencana Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025–2029*. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal 2020–2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2024). *Rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Myrdal, G. (1957). *Economic theory and underdeveloped regions*. Duckworth.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020–2024*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025). *RPJMN 2025–2029: Fondasi awal mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). *Economic development* (13th ed.). Pearson.
- World Bank. (2024). *World Development Report 2024: The Middle-Income Trap*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-2078-7>

PROFIL PENULIS



Wiljan Atfentia Kotngoran, S.E., M.Si.

Menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Ekonomi Pembangunan dan melanjutkan S2 pada program studi Ilmu Ekonomi. Seorang dosen memandang karya bukan sekadar kewajiban akademik melainkan ruang berbagi gagasan dan makna. Di tengah kesibukan mengajar dan meneliti, tumbuh keinginan untuk berkarya melalui kolaborasi buku dimana hal ini merupakan sebuah proses yang

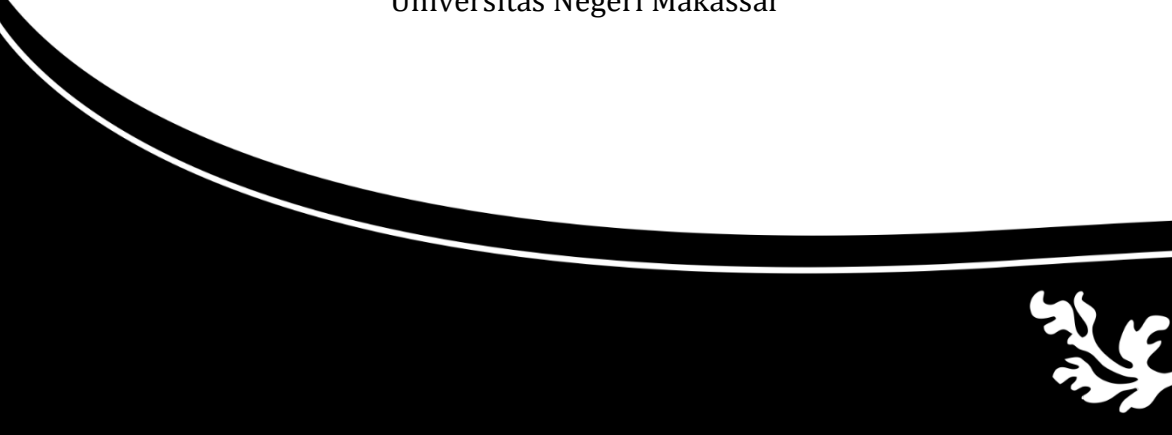
mempertemukan beragam sudut pandang, pengalaman, dan keahlian. Menulis bersama bukan hanya tentang menghasilkan buku, tetapi tentang membangun dialog intelektual, saling belajar, dan meninggalkan jejak pemikiran yang bermanfaat bagi dunia pendidikan dan masyarakat luas. enhywiljan@gmail.com



BAB 11

KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL OPTIMASI PAJAK, PENGELOLAAN UTANG, DAN ALOKASI APBN

Ahmad Nashiruddin Mushoddiq Rahman, S.Pd., M.Ak.
Universitas Negeri Makassar



Pendahuluan

Kebijakan fiskal mengarahkan pembangunan melalui penerimaan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Dalam teori keuangan publik, instrumen ini menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Musgrave, 1959). Bagi Indonesia, fungsi tersebut mencakup pembiayaan infrastruktur dan modal manusia, perlindungan kelompok rentan, pengendalian siklus ekonomi, serta transformasi struktur produksi. Kerangka normatifnya bertumpu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Republik Indonesia, 2003, 2021, 2022).

Kebutuhan pembangunan masih melampaui kapasitas pendapatan. APBN 2025 menetapkan pendapatan negara Rp3.005,1 triliun, belanja Rp3.621,3 triliun, penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun, dan defisit Rp616,2 triliun atau 2,53% produk domestik bruto (PDB) (Kementerian Keuangan Republik Indonesia [Kemenkeu RI], 2024). Pada September 2024, tingkat kemiskinan tercatat 8,57% dan rasio Gini 0,381 (Badan Pusat Statistik [BPS], 2025a, 2025b). Kondisi tersebut menegaskan tiga agenda yang saling terkait: memperkuat pajak sebagai sumber kemandirian fiskal, mengelola utang tanpa mengurangi ruang belanja masa depan, dan meningkatkan kualitas alokasi APBN. Bab ini membahas ketiganya dengan memadukan teori, regulasi, data fiskal, dan temuan empiris.

Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Pembangunan

Kebijakan fiskal dalam ekonomi pembangunan tidak hanya berfungsi mengelola fluktuasi perekonomian jangka pendek, tetapi juga membentuk kapasitas produksi, distribusi kesejahteraan, dan kualitas institusi dalam jangka panjang. Melalui pajak, belanja negara, transfer, subsidi, dan pembiayaan anggaran, pemerintah memengaruhi permintaan agregat sekaligus menentukan arah akumulasi modal fisik dan manusia. Kerangka keuangan publik menempatkan kebijakan fiskal pada tiga fungsi utama, yaitu alokasi sumber daya, distribusi

pendapatan, dan stabilisasi ekonomi (Musgrave, 1959). Dalam negara berkembang, ketiga fungsi tersebut saling berkaitan karena keterbatasan infrastruktur, ketimpangan akses terhadap pelayanan dasar, kegagalan pasar, dan kapasitas institusional dapat menghambat transformasi ekonomi.

Perspektif Keynesian menjelaskan bahwa perubahan belanja pemerintah dan pajak memengaruhi *output* melalui permintaan agregat. Ketika konsumsi dan investasi swasta melemah, peningkatan belanja atau pemberian stimulus perpajakan dapat menahan kontraksi ekonomi melalui efek pengganda fiskal. Sebaliknya, ketika perekonomian mengalami tekanan inflasi dan permintaan berlebihan, konsolidasi fiskal dapat membantu mengurangi ketidakseimbangan. Besarnya pengganda fiskal tidak bersifat tetap, tetapi dipengaruhi oleh kondisi siklus ekonomi, keterbukaan perdagangan, respons kebijakan moneter, kapasitas produksi, struktur pembiayaan, dan tingkat utang pemerintah (Ilzetzki et al., 2013).

Dalam perspektif pertumbuhan endogen, belanja pemerintah dapat meningkatkan kapasitas produksi apabila diarahkan pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, riset, dan teknologi. Barro (1990) menempatkan pelayanan publik yang produktif sebagai salah satu *input* dalam proses produksi swasta. Infrastruktur transportasi, energi, konektivitas digital, tenaga kerja yang sehat, dan keterampilan yang memadai dapat menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan produktivitas. Belanja publik dengan karakteristik tersebut dapat menciptakan efek *crowding-in*, yaitu mendorong investasi swasta karena tersedianya fasilitas dan lingkungan usaha yang lebih baik.

Efektivitas fiskal akhirnya ditentukan oleh kapasitas kelembagaan. Pemerintah harus mampu mengidentifikasi basis pajak, menegakkan kepatuhan, memilih prioritas, melaksanakan program, dan mengevaluasi hasil. Besley dan Persson (2014) menunjukkan bahwa rendahnya penerimaan di negara berkembang berkaitan dengan kapasitas administrasi dan legitimasi negara. Dengan demikian, kebijakan fiskal pembangunan perlu memenuhi empat prinsip: tersedianya ruang untuk merespons guncangan, keberlanjutan defisit dan utang, alokasi berbasis hasil, serta pembagian beban dan manfaat yang adil.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2025a, 15 Januari). *Gini ratio September 2024 tercatat sebesar 0,381*.
- Badan Pusat Statistik. (2025b, 15 Januari). *Persentase penduduk miskin September 2024 turun menjadi 8,57 persen*.
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html>
- Barro, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endogenous growth. *Journal of Political Economy*, 98(5, Part 2), S103-S125. <https://doi.org/10.1086/261726>
- Besley, T., & Persson, T. (2014). Why do developing countries tax so little? *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 99-120. <https://doi.org/10.1257/jep.28.4.99>
- Blanchard, O. (2019). Public debt and low interest rates. *American Economic Review*, 109(4), 1197-1229. <https://doi.org/10.1257/aer.109.4.1197>
- Ilzetzki, E., Mendoza, E. G., & Végh, C. A. (2013). How big (small?) are fiscal multipliers? *Journal of Monetary Economics*, 60(2), 239-254. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2012.10.011>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Informasi APBN tahun anggaran 2025: Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan*.
<https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/c4cc1854-96f4-42f4-95b8-94cf49a46f10/Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2025.pdf>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210-225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kuncoro, H. (2018). The impact of government consumption on private expenditures in a developing country: The case of Indonesia. *Business and Economic Horizons*, 14(1), 1-16. <https://doi.org/10.15208/beh.2018.1>

- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. McGraw-Hill.
- Noviar, H., Syahril, Badli, S., & Sari, Y. P. (2023). Efficiency analysis of central government transfer funds to the regions income inequality. *Akbis*, 7(2). <https://doi.org/10.35308/akbis.v7i2.7571>
- Nurosidah, S., Khusaini, M., & Prasetyia, F. (2023). Intergovernmental transfers reduction policy and flypaper effect: Case of COVID-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 15(1), 1-18. <https://doi.org/10.17977/um002v15i12023p001>
- Nursini. (2017). Effect of fiscal policy and trade openness on economic growth in Indonesia: 1990-2015. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(1), 358-364.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *OECD economic surveys: Indonesia 2024*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/de87555a-en>
- Rahman, Y. A., Rahmayani, D., & Hapsoro, B. B. (2022). Debt sustainability measurement model in Indonesia using fiscal diagnostics. In *Proceedings of the 4th International Conference on Economics, Business and Economic Education Science (ICE-BEES 2021)*. EAI. <https://doi.org/10.4108/eai.27-7-2021.2316847>
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Supriyati, Hapsari, I., & Nahumury, J. (2024). The influence of trust in the government, perceived fairness, and tax morale on taxpayer compliance: Implications for budget formation. *Public and Municipal Finance*, 13(2), 129-139. [https://doi.org/10.21511/pmf.13\(2\).2024.11](https://doi.org/10.21511/pmf.13(2).2024.11)
- Widiastuti, N., Fitraday, A., & Widodo, T. (2023). Assessing fiscal

sustainability in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 15(1), 101-123.
<https://doi.org/10.17977/um002v15i12023p101>

Wirandana, P. A., & Khoirunurrofik. (2022). Educational inequality in Indonesia: Are intergovernmental fiscal transfers effective in reducing the gap? *Educational Studies*. Advance online publication.
<https://doi.org/10.1080/03055698.2022.2103647>

World Bank. (2020). *Indonesia public expenditure review 2020: Spending for better results*. <https://doi.org/10.1596/33954>

PROFIL PENULIS



Nashiruddin Mushoddiq Rahman, S.Pd., M.Ak.

Lahir di Makassar tahun 1992, penulis memilih kepakaran pada bidang perpajakan dan akuntansi sektor publik. Alumni Universitas Negeri Makassar Program Studi Pendidikan Akuntansi pada tahun 2014 dan melanjutkan pendidikan serta menyelesaikan studi pada tahun 2019 di Program Studi Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia. Berkarir pada Pemerintah Kota Makassar sejak tahun 2012 hingga tahun 2023. Mulai menjadi dosen pada tahun 2023 pada Program Studi Diploma Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Penulis memiliki kepakaran di bidang perpajakan dan akuntansi sektor publik. Dalam perjalanan menuju dosen profesional, penulis mencoba aktif sebagai peneliti dan penulis dibidang perpajakan dan akuntansi sektor publik.

Email Penulis: ahmad.nashiruddin@unm.ac.id

BAB 12
EKONOMI SUMBER
DAYA ALAM, KUTUKAN
SUMBER DAYA
(*RESOURCE CURSE*),
DAN KETAHANAN
ENERGI

Muhammad Daffa Z., S.T., M.M.
Universitas Samudra



Ekonomi Sumber Daya Alam dalam Perspektif Pembangunan

1. Konsep dan Karakteristik Sumber Daya Alam dalam Ekonomi

Sumber daya alam didefinisikan sebagai seluruh potensi alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mendukung aktivitas ekonomi. Pemanfaatan sumber daya alam telah menjadi fondasi utama dalam pembentukan struktur ekonomi berbagai negara di dunia. Dalam kajian ekonomi, sumber daya alam diklasifikasikan berdasarkan kemampuan regenerasinya menjadi sumber daya terbarukan dan tidak terbarukan. Sumber daya terbarukan merupakan jenis sumber daya yang dapat pulih secara alami dalam waktu relatif singkat melalui siklus ekologis. Sebaliknya, sumber daya tidak terbarukan terbentuk melalui proses geologis yang membutuhkan waktu sangat panjang sehingga ketersediaannya bersifat terbatas. Perbedaan karakteristik ini memengaruhi pola eksploitasi, kebijakan pengelolaan, serta keberlanjutan pemanfaatannya dalam jangka panjang. Klasifikasi tersebut menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam (Bawazeer & Kurniawan, 2026).

Tabel 12.1: Klasifikasi Sumber Daya Alam

Jenis SDA	Definisi	Contoh	Karakteristik Utama	Implikasi Ekonomi
Terbarukan	SDA yang dapat pulih secara alami dalam waktu relatif singkat	Hutan, air, energi surya	Regeneratif, bergantung pada ekosistem	Mendukung keberlanjutan jika dikelola baik
Tidak Terbarukan	SDA yang terbentuk dalam waktu geologis panjang	Minyak bumi, gas, batu bara	Terbatas, tidak dapat diperbarui cepat	Rentan eksploitasi berlebihan dan ketergantungan
Semi-terbarukan	SDA yang dapat pulih tetapi membutuhkan waktu lama	Tanah, perikanan tertentu	Bergantung pada tingkat eksploitasi	Risiko degradasi jika overuse

Sumber: Diolah penulis

Sumber daya alam menempati posisi strategis dalam struktur ekonomi nasional sebagai salah satu faktor produksi utama. Keberadaan sumber daya alam mendorong aktivitas produksi di sektor primer seperti pertambangan, kehutanan, dan perikanan. Dalam banyak negara berkembang, sektor berbasis sumber daya alam menjadi penyumbang utama terhadap produk domestik bruto. Peran strategis ini menjadikan sumber daya alam sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional (Hossain et al., 2025).

Sumber daya alam juga berperan sebagai sumber penerimaan negara melalui pajak, royalti, dan devisa ekspor. Pendapatan dari sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas fiskal negara. Selain itu, aktivitas eksploitasi sumber daya alam menciptakan lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap sektor ini dapat menghambat diversifikasi ekonomi. Ketika harga komoditas global mengalami fluktuasi, perekonomian nasional menjadi rentan terhadap guncangan eksternal. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana (Eriza & Emalia, 2026).

Konsep keterbatasan menjadi dasar utama dalam analisis ekonomi, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam tidak tersedia dalam jumlah tak terbatas sehingga penggunaannya harus mempertimbangkan efisiensi dan keberlanjutan. Kelangkaan terjadi ketika kebutuhan manusia melebihi ketersediaan sumber daya yang ada. Dalam situasi ini, pilihan ekonomi harus dibuat untuk menentukan prioritas penggunaan sumber daya. Keterbatasan (Ham & Abdillah, 2025) tersebut memunculkan trade-off antara eksploitasi ekonomi dan konservasi lingkungan. Pengelolaan yang tidak tepat dapat mempercepat deplesi sumber daya dan menimbulkan kerusakan ekologis. Kondisi ini memperkuat pentingnya pendekatan ekonomi yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan (Vikri & Januardo, 2025).

Daftar Pustaka

- Andi, S. A. F., & Nur, I. (2026). Nikel untuk Siapa? Keamanan Manusia, Kerusakan Lingkungan, dan Tantangan Transisi Energi Global di Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 3(3), 01–13.
<https://doi.org/10.62383/konsensus.v3i3.1722>
- Bawazeer, M., & Kurniawan, A. (2026). *Transformasi ekonomi politik sumber daya alam: Dari kutukan menjadi kekuatan*. Star Digital Publishing.
- Eriza, A. P., & Emalia, Z. (2026). Paradoks sumber daya alam: Pengaruh dana bagi hasil sumber daya alam, ketimpangan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi kaya sumber daya alam di Indonesia. *Nusantara Hasana Journal*, 5(10), 136–148.
- Ham, U., & Abdillah, A. (2025). Eksploitasi Nikel di Era Energi Terbarukan: Antara Harapan Global dan Kutukan Sumber Daya, Studi Kasus di Sulawesi Tenggara, Indonesia. *Verdict: Journal of Law Science*, 4(1), 57–69.
<https://doi.org/10.59011/vjlaws.4.1.2025.57-69>
- Hossain, Md. E., Yağış, O., Haseeb, M., Khudoykulov, K., Wibowo, W., & Esquivias, M. A. (2025). Striking the balance in resource management: Exploring the impact of natural and mineral resources on financial development in BRICS-T nations. *Environmental and Sustainability Indicators*, 28.
<https://doi.org/10.1016/j.indic.2025.100905>
- Margono, R. (2026). *Green Corruption: Menjerat Pelaku Korupsi di Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam*.
- Sholikin, A. (2020). Teori kutukan sumber daya alam (Resource Curse) dalam perspektif ilmu politik. *MADANI: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(1).
- Sholikin, A. (2025). Realisme atau romantisme? Peran masyarakat sipil dalam minimalisasi kutukan sumber daya alam di Bojonegoro. *Jurnal Transformative*, 11(1).

- Vikri, P. P., & Januardo, S. P. S. (2025). Paradoks Hukum Perdagangan Indonesia: Antara Green Economy dan Ekspor Sumber Daya Alam yang Eksploitatif. *Journal Juridisch*, 3(2), 142–154. <https://doi.org/10.26623/jj.v3i2.12350>
- Yuhasyra, D. (2024). *Kutukan sumber daya alam (resource curse) atau paradox of plenty: Sebuah fenomena yang harus diwaspadai dan dihindari*. Blog Universitas Padjadjaran.

PROFIL PENULIS



Muhammad Daffa Z., S.T., M.M.

Penulis memiliki latar belakang pendidikan yang memadukan bidang teknik, manajemen, serta pendidikan. Ketertarikan penulis terhadap ilmu pengetahuan dan dunia industri berkembang sejak menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Langsa. Penulis kemudian menyelesaikan pendidikan sarjana teknik kimia di Universitas Syiah Kuala pada tahun 2020. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan magister manajemen dengan konsentrasi manajemen keuangan di Universitas Muhammadiyah Palembang dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2022.

Penulis memiliki pengalaman profesional sebagai supervisor di industri manufaktur, *planner hygiene*, asisten laboratorium, serta tenaga profesional dalam bidang pengendalian proses, perencanaan kerja, keselamatan, dan pengelolaan operasional. Saat ini, penulis aktif sebagai dosen pada Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samudra. Penulis juga menjalankan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Saat ini, penulis mendalami konsentrasi Manajemen Industri dan Bisnis Berkelanjutan. Melalui bidang tersebut, penulis berharap dapat berkontribusi dalam pengembangan industri yang efektif, bertanggung jawab, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Penulis juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi akademik dan profesional melalui kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, serta pengembangan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat dan dunia industri secara berkelanjutan pada tingkat nasional dan internasional kelak.

Email Penulis: dapapiton@unsam.ac.id

BAB 13

TRANSFORMASI

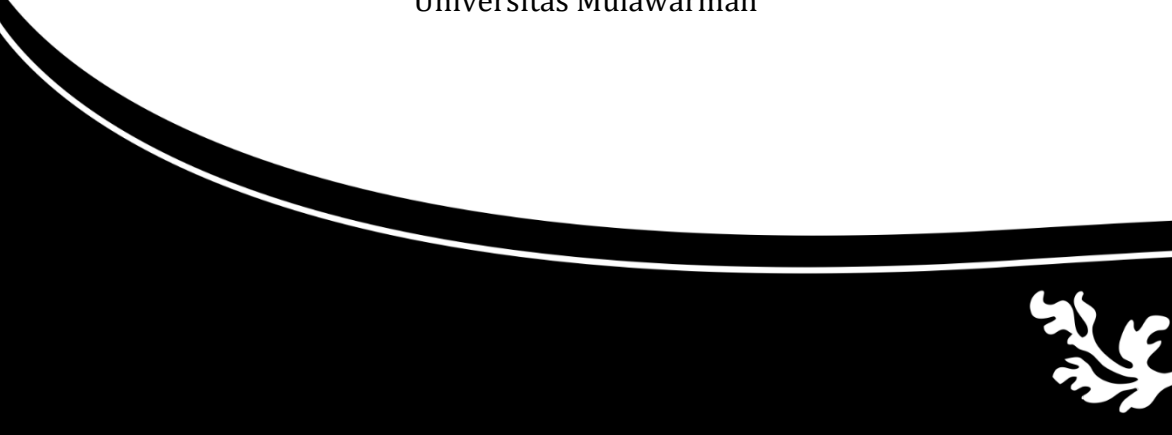
EKONOMI DIGITAL: *E-*

COMMERCE, FINTECH,

DAN KESIAPAN TENAGA

KERJA ERA 4.0

Ellen D. Oktanti Irianto, S.E., M.Sc.
Universitas Mulawarman



Transformasi Digital dalam Ekonomi Pembangunan Indonesia

Ekonomi digital Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh adopsi teknologi internet secara luas, ekspansi sektor *e-commerce* dan *fintech*, serta dukungan kebijakan pemerintah (Meidyasari, 2024; Uula & Surbakti, 2024). Cakupan ekonomi digital sendiri cukup luas, meliputi *e-commerce*, keuangan digital, telekomunikasi, pengembangan perangkat lunak, hingga kewirausahaan berbasis inovasi, dan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, serta kemajuan teknologi (Adi Pratama & Made Diwyarthi, 2024). Pada 2019, nilai ekonomi digital Indonesia tercatat sebesar USD 40 miliar, dengan sektor *e-commerce* menyumbang USD 20,9 miliar di antaranya (Noerlina et al., 2023). Indonesia tengah memposisikan diri untuk menjadi ekonomi digital terbesar kedua di Asia Tenggara, didorong oleh regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung inovasi dan kewirausahaan digital (Kunasegaran et al., 2024).

Revolusi Industri Keempat (Industri 4.0) telah menjadi pendorong fundamental transformasi struktural ekonomi di kawasan ASEAN dan negara berkembang lainnya (Levente & Klemensits, 2023; Tampubolon & Nababan, 2022). Ditandai dengan perpaduan teknologi digital, fisik, dan biologis, Industri 4.0 membentuk ulang industri, ekonomi, dan masyarakat secara bersamaan (Levente & Klemensits, 2023). Di kawasan ASEAN, kontribusi digitalisasi terhadap PDB kawasan tumbuh dari 1,3 persen pada 2015 menjadi 3,7 persen pada 2019, dengan proyeksi mencapai 8,5 persen pada 2025. Asian Development Bank bahkan memproyeksikan tambahan PDB sebesar USD 1 triliun dari digitalisasi ASEAN pada 2025, dengan ASEAN diproyeksikan menjadi ekonomi terbesar keempat dunia pada 2030. Analisis taksonomi terhadap negara-negara ASEAN juga mengungkapkan tiga klaster berbeda dalam tingkat kemajuan digital, yang selaras dengan perbedaan sosial-ekonomi yang lebih luas, dengan tingkat PDB dan industrialisasi yang lebih tinggi secara konsisten berasosiasi dengan kemajuan digital yang lebih besar (Siuta-Tokarska et al., 2025).

Dalam konstelasi regional tersebut, Indonesia menempati posisi yang secara strategis penting. Ekonomi digital Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara, menyumbang 40 persen dari seluruh pasar digital kawasan dan tumbuh dari USD 41 miliar pada 2019 menjadi USD 77 miliar pada 2022 (Haqqi, 2023). Pemerintah Indonesia meluncurkan peta jalan "Making Indonesia 4.0" pada April 2018 untuk merevitalisasi sektor manufaktur dan mempersiapkan negara menghadapi peluang Industri 4.0 (*Innovate Indonesia*, 2020). Kecerdasan buatan (AI) bahkan diidentifikasi sebagai tulang punggung ekonomi digital di era Industri 4.0, dan Indonesia telah menempatkan pengembangan AI sebagai hal sentral dalam mencapai tujuan ekonomi jangka panjangnya (Sungkono & Ketut Widana, 2024). Meski demikian, sejumlah tantangan struktural tetap membayangi, termasuk infrastruktur digital yang belum memadai, kesenjangan keterampilan, dan hambatan regulasi yang berpotensi menghalangi transformasi yang inklusif (Haqqi, 2023; Sungkono & Ketut Widana, 2024).

Untuk merespons dinamika ini, kerja sama regional melalui kerangka ASEAN *Digital Integration Framework* dan Bandar Seri Begawan *Roadmap* menyediakan mekanisme institusional untuk mengoordinasikan integrasi ekonomi digital kawasan (Tahalele et al., 2023), dengan kebijakan data bersama, kerangka keuangan digital, dan program pelatihan tenaga kerja direkomendasikan sebagai prioritas kebijakan utama bagi negara-negara Asia Tenggara (Ha & Chuah, 2023). Transformasi digital juga diidentifikasi sebagai solusi kunci pemulihan ekonomi dan sumber pertumbuhan baru dalam konteks pasca pandemi.

***E-Commerce*: Pertumbuhan, Struktur Pasar, dan Dampak Ekonomi**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Sekitar 99,99 persen dari seluruh unit usaha di Indonesia tergolong UMKM, dengan jumlah total mencapai 65,47 juta unit pada 2019 (Tisyani & Sushandoyo, 2023). UMKM menyerap lebih dari 90 persen total tenaga kerja dan

Daftar Pustaka

- Adi Pratama, I. W., & Made Diwyarthi, N. D. (2024). Optimization of Human Resources and Utilization of Information Technology in Driving the Digital Economy. *West Science Information System and Technology*. <https://doi.org/10.58812/wsist.v2i01.829>
- Alamanda, A. E. (2022). Empowerment Community Welfare After the Pandemic in Indonesia: The Role of Fintech? *Journal of Judicial Review*. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7223>
- Almaududi Ausat, A. M., & Peirisal, T. (2021). Determinants of E-Commerce Adoption on Business Performance: A Study of MSMEs in Malang City, Indonesia. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*. <https://doi.org/10.25077/josi.v20.n2.p104-114.2021>
- Amsyar Arif, M. I., binti Halim, A. H., & bin Halim, M. 'Afifi. (2024). Financial Technology: An Overview on Shariah and Legal Implication. *Kne Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14818>
- Badri, F., & Amrina, D. H. (2023). Strengthening the MSME Digital Economy as Indonesia's National Economic Resilience. *Journal of International Conference Proceedings*. <https://doi.org/10.32535/jicp.v6i6.2728>
- Bagale, G. (2014). Determinants of E-Commerce in Indian MSME Sector: A Conceptual Research Model Based on TOE Framework. *Universal Journal of Management*. <https://doi.org/10.13189/ujm.2014.020301>
- Cao, V. H., & Nguyen, M. (2023). Financial Technology: Implementation Experience in Some Countries and Policy Implications. *Tập San Khoa Học Và Kỹ Thuật Trường Đại Học Bình Dương*. <https://doi.org/10.56097/binhduonguniversityjournalofscienceandtechnology.v5i4.76>
- Digital Jobs and Digital Skills. (2022). <https://doi.org/10.22617/spr220348>
- Diniyya, A. A., Aulia, M., & Wahyudi, R. (2021). Financial Technology Regulation in Malaysia and Indonesia: A Comparative Study. *Ihtifaz*

- Journal of Islamic Economics Finance and Banking*.
<https://doi.org/10.12928/ijiefb.v3i2.2703>
- Engriyani, E., & Madhakomala, R. (2023). The Implementation of Non-Formal Education and Training Programs to Encourage the National Economy Concerning the Unemployment Rate in Southeast Asia. *International Journal of Social Science and Human Research*. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i11-52>
- Fabe, A. P., Toledo, J. A., & Laksmi, S. (2022). The Growth of Financial Technology in Indonesia: Implications for Terrorism Financing. *International Annals of Criminology*. <https://doi.org/10.1017/cri.2022.16>
- Fitriana, D., & Wijanarko, D. S. (2023). Legal Urgence for Registration and Establishment of Legal Fintech Companies Based on Information Technology Authority Regulation Number 77/Pojk.01/2016 Concerning Money-Base Loan Services and Bank Indonesia Regulation Number 19/12/Pbi/2017 Concerning. *Journal of Law Politic and Humanities*. <https://doi.org/10.38035/jlph.v3i1.143>
- Fitriani, N., & Setiawan, D. (2023). Why Is Technology Adoption Not Optimised? E-commerce Business Investigation in Java Island. *Journal of Socioeconomics and Development*. <https://doi.org/10.31328/jsed.v6i1.4518>
- Gagnon, C., & Gagnon, J. (2021). *Migration in Asia*. <https://doi.org/10.1787/38a9c133-en>
- Ha, H., & Chuah, C. K. P. (2023). Digital Economy in Southeast Asia: Challenges, Opportunities and Future Development. *Southeast Asia a Multidisciplinary Journal*. <https://doi.org/10.1108/seamj-02-2023-0023>
- Hapsari, R. A., Maroni, M., Satria, I., & Ariyani, N. D. (2019). The Existence of Regulatory Sandbox to Encourage the Growth of Financial Technology in Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no3.1739>
- Haqqi, H. (2023). The Government's Policy in Encouraging the Global

- Competitiveness of Indonesian MSMEs Through the Digital Ecosystem. *Journal of Economics Management and Trade*. <https://doi.org/10.9734/jemt/2023/v29i81115>
- Haryati, E., Mustofa, A., Syahadiyanti, L., & Suyanto, S. (2023). Marketplace Governance in the Context of Empowering MSMEs Inside the Realm of Online Shopping. *Journal of Community Service and Empowerment*. <https://doi.org/10.22219/jcse.v4i3.29432>
- Hudaefi, F. A., Hassan, M. K., & Abduh, M. (2023). Exploring the Development of Islamic Fintech Ecosystem in Indonesia: A Text Analytics. *Qualitative Research in Financial Markets*. <https://doi.org/10.1108/qrfm-04-2022-0058>
- Imam, T., Sweetman McInnes, A. N., Colombage, S., & Grose, R. (2022). Opportunities and Barriers for FinTech in SAARC and ASEAN Countries. *Journal of Risk and Financial Management*. <https://doi.org/10.3390/jrfm15020077>
- Innovate Indonesia*: (2020). <https://doi.org/10.22617/sgp200085-2>
- Jagannathan, S., & Geronimo, D. (2021). *Reaping the Benefits of Industry 4.0 Through Skills Development in High-Growth Industries in Southeast Asia: Insights From Cambodia, Indonesia, the Philippines, and Viet Nam*. <https://doi.org/10.22617/spr200328>
- Jose, K. J. (2020). Revamping Finance via Fintech : Promises, Perils, and Practices in ASEAN. *Foreign Policy Review*. <https://doi.org/10.47706/kkifpr.2020.13.129-144>
- Kunasegaran, M., Xing, Y., & Kunjiapu, S. (2024). Unveiling the Impact of the Digital Economy on Future Employment: A Comparison Study Among Selected Southeast Asian Countries. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i5/21725>
- Lee, J. H., & Owens, J. (2023). *Managing Fintech Risks*. <https://doi.org/10.22617/brf230170-2>
- Levente, H., & Klemensits, P. (2023). Industrial Revolution 4.0 - A New World Order? *Tạp Chí Khoa Học Thương Mại*. <https://doi.org/10.54404/jts.2023.11.01.01>

- Meidyasari, S. (2024). The Impact of Digital Economy in Driving Economic Growth and Development in Indonesia. *Interdisciplinary Journal and Humanity (Injury)*.
<https://doi.org/10.58631/injury.v3i11.1306>
- Miah, M. T., Késmárki-Gally, S. E., Dancs, A., & Fekete-Farkas, M. (2024). A Systematic Review of Industry 4.0 Technology on Workforce Employability and Skills: Driving Success Factors and Challenges in South Asia. *Economies*.
<https://doi.org/10.3390/economies12020035>
- Noerlina, N., Freda, D. C., Mayo, G., Tirtawijaya, Y. K., & Samuel, J. (2023). The Future Prospect of Mobile Banking Technology Enhancement in Indonesia. *Business Economic Communication and Social Sciences (Becoss) Journal*.
<https://doi.org/10.21512/becossjournal.v5i1.8743>
- Noviaristanti, S., & Huda, Y. M. (2022). *Factor Affecting E-Marketplace Adoption on MSMEs in Bandung, Indonesia*.
<https://doi.org/10.46254/eu05.20220459>
- Puwaningwulan, M. M., Wulandari, T. A., & Anggaswari, N. A. (2024). *The Impact of Tiktok Shop Policy Dynamics to the Micro-Small-Medium-Sized Enterprises Sustainability*.
https://doi.org/10.2991/978-2-38476-269-9_11
- Rahmadi, R., Herlan, A. F., & Tamara, B. (2021). Regulatory Reconstruction of E-Commerce Transactions in Perspective Legal Protection for Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia. *Pelita Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*.
<https://doi.org/10.33592/pelita.v21i1.1320>
- Secretariat, C. (2022). *Commonwealth Countries: Driving FinTech Innovation*. <https://doi.org/10.14217/comsec.1070>
- Shi, J., & Wang, Y. (2023). Chance or Challenge for Fintech in SEA. *Eximia*. <https://doi.org/10.47577/eximia.v11i1.295>
- Siuta-Tokarska, B., Yusuf, I. A., Kowalik, M., Přívara, A., Sharma, G. D., & Suder, M. (2025). *Digital Transformation Pathways in Southeast Asia: A Temporal-Taxonomic Study*.

- <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-7099862/v1>
- Sudan, F. K. (2021). Fourth Industrial Revolution and Future of Work in Asia. *Global Economics Science*. <https://doi.org/10.37256/ges.222021783>
- Sungkono, S., & Ketut Widana, I. D. (2024). Optimizing Artificial Intelligence (AI) as a Catalyst for Digital Economic Transformation to Increase National Economic Growth. *Technium Social Sciences Journal*. <https://doi.org/10.47577/tssj.v58i1.11174>
- Tahalele, M. P., Dhiaulhaq, A., Putra, R. A., Affandi, R. A., Arnakim, L. Y., & Mursitama, T. N. (2023). The Trajectory and Trend of International Political Economy in Southeast Asia. *Jas (Journal of Asean Studies)*. <https://doi.org/10.21512/jas.v10i2.9184>
- Tampubolon, J., & Nababan, T. S. (2022). ASEAN's Factory Economy in the Fourth Industrial Revolution Era. *Economy of Regions*. <https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2022-1-4>
- Tiranda, Y. M., & Rizki, L. T. (2022). The Legal Ethics in Financial Technology: How Is It Regulated? *Jurnal Akta*. <https://doi.org/10.30659/akta.v9i3.24000>
- Tisyani, A. S., & Sushandoyo, D. (2023). E-Commerce Platforms as Business Agility Reinforcement to Compete in the Market: Cases of Indonesian MSME. *Journal Integration of Management Studies*. <https://doi.org/10.58229/jims.v1i1.23>
- Tritto, A., He, Y., & Junaedi, V. A. (2020). Governing the Gold Rush Into Emerging Markets: A Case Study of Indonesia's Regulatory Responses to the Expansion of Chinese-Backed Online P2P Lending. *Financial Innovation*. <https://doi.org/10.1186/s40854-020-00202-4>
- Uula, M. M., & Surbakti, H. (2024). Digital Economics in Indonesia: Development and Research Trend. *Der*. <https://doi.org/10.58968/der.v1i1.473>
- Wijaya, T. (2023). *Unpacking the Fintech Regulatory Sandbox Framework in Indonesia: Risks Management and the Data Privacy Imperative*. <https://doi.org/10.35497/565201>

- Wu, A.-C., & Kao, D.-D. (2022). Mapping the Sustainable Human-Resource Challenges in Southeast Asia's FinTech Sector. *Journal of Risk and Financial Management*.
<https://doi.org/10.3390/jrfm15070307>
- Yacob, S., Sulistiyo, U., Marzal, J., Siregar, A. P., & Mukminin, A. (2023). An Investigation of Entrepreneurial Orientation, Social Media Adoption and E-Commerce on MSME Business Performance: An Empirical Study in Indonesia. *Revista Galega De Economía*.
<https://doi.org/10.15304/rge.32.3.9001>

PROFIL PENULIS



Ellen D. Oktanti Irianto, S.E., M.Sc.

Ia adalah dosen bidang manajemen keuangan dan keuangan berkelanjutan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Mulawarman. Sebelumnya, Ia menyelesaikan pendidikan S1 di Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan menyelesaikan S2 di Magister Sains Manajemen Universitas Gadjah Mada. Mengampu mata kuliah Pengantar Manajemen, Manajemen Keuangan, Manajemen Rantai Pasokan, Manajemen Strategi dan Pengembangan Diri, serta mengampu mata kuliah Metode Penelitian pada Universitas Terbuka melalui skema Tutorial Webinar (Tuweb). Selain aktif mengajar, penulis juga seorang *reviewer* untuk sejumlah jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus, di antaranya diterbitkan oleh Wiley dan Emerald. Minat riset penulis berfokus pada isu manajemen keuangan korporasi, keuangan berkelanjutan, ESG, dan tanggung jawab sosial perusahaan, dengan penekanan pada konteks ekonomi Indonesia dan global. Ia merupakan seorang motivator yang gemar mengisi seminar motivasi dan juga terkait dengan *public speaking*. Karna menurutnya mentransfer nilai positif merupakan hal positif yang harus terus dilakukan, karena sejatinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sesama. Harapan dan doa sepenuhnya milik manusia, namun Kuasa tetap milik Allah SWT.
Email Penulis: ellend@feb.unmul.ac.id



BAB 14

EKONOMI HIJAU DAN

STRATEGI

PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN

Dr. Ir. Hardjanto Nusantara, M.M.
Universitas Raharja



Pendahuluan: Mengapa Ekonomi Hijau Menjadi sebuah Keniscayaan?

Indonesia berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi yang pesat selama beberapa dekade terakhir telah membawa kemajuan signifikan, berupa pendapatan per kapita meningkat, kemiskinan menurun, dan infrastruktur berkembang. Di sisi lain, model pembangunan yang mengandalkan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran telah menyisakan persoalan serius berupa kerusakan hutan, polusi, ketimpangan sosial, dan kerentanan terhadap perubahan iklim.

Dalam konteks inilah ekonomi hijau (*green economy*) muncul bukan sekadar sebagai wacana, melainkan sebagai kebutuhan mendesak. Sebagai negara dengan keaneka ragam hayati tertinggi kedua dan hutan tropis terluas ketiga di dunia, Indonesia dijuluki "paru-paru dunia". Namun, predikat ini juga membawa tanggung jawab besar. Konsep ekonomi hijau menawarkan jalan tengah berupa pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, tetapi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan keadilan sosial.

Dalam Bab ini, kita akan mengupas tuntas konsep ekonomi hijau, keterkaitannya dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), implementasi di Indonesia, dampak yang telah dirasakan, tantangan yang menghadang, serta strategi ke depan. Pembahasan ini penting karena transisi menuju ekonomi hijau bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan bagi masa depan bangsa.

Memahami Konsep Ekonomi Hijau

Istilah "ekonomi hijau" pertama kali muncul pada tahun 1989 di Inggris melalui laporan berjudul "Untuk Ekonomi Hijau" yang disusun oleh para ekonom terkemuka. Sejak itu, konsep ini terus berkembang dan mendapatkan perhatian global, terutama setelah krisis keuangan 2008 yang mendorong pencarian model ekonomi baru yang lebih berkelanjutan.

Pada tahun 2010, Pemerintah Indonesia mendefinisikan ekonomi hijau sebagai model pembangunan yang mengutamakan efisiensi penggunaan sumber daya alam. Ekonomi hijau merupakan sistem

ekonomi yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial. Tujuannya tidak hanya untuk efisiensi, tetapi juga pengurangan terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan penciptaan lapangan kerja baru.

1. Tiga Pilar Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau dibangun di atas tiga pilar yang saling terkait, yaitu Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan, dan Pilar Sosial.

- a. Pilar ekonomi: Pertumbuhan ekonomi tetap menjadi tujuan, tetapi dilakukan dengan cara yang berbeda. Bukan pertumbuhan yang diukur semata dari Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan pertumbuhan yang memperhitungkan nilai sumber daya alam dan jasa ekosistem.
- b. Pilar lingkungan: Ekonomi hijau menuntut pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ini berarti penggunaan sumber daya tidak melebihi kemampuan alam untuk memperbarui dirinya. Emisi karbon harus dikurangi, limbah diminimalkan, dan keanekaragaman hayati dilestarikan.
- c. Pilar sosial: Transisi hijau harus inklusif dan berkeadilan. Tidak boleh ada pihak yang tertinggal dalam proses ini. Masyarakat yang selama ini bergantung pada industri ekstraktif harus mendapat dukungan untuk beralih ke sektor-sektor baru yang ramah lingkungan.

2. Perbedaan Ekonomi Hijau dengan Model Ekonomi Konvensional

Model ekonomi konvensional sering disebut sebagai ekonomi "cokelat" karena mengandalkan bahan bakar fosil dan eksploitasi sumber daya. Ekonomi hijau berbeda secara fundamental. Ia mengakui bahwa modal alam (hutan, air, udara bersih, keanekaragaman hayati) adalah aset yang harus dijaga, bukan dieksploitasi. Ekonomi hijau menerapkan prinsip "polusi membayar" dan mendorong efisiensi sumber daya melalui ekonomi sirkular, di mana limbah dari satu proses menjadi bahan baku proses lain.

b. Dampak ketenagakerjaan

- 1) Menyerap sekitar 800 tenaga kerja lokal selama masa konstruksi
- 2) Membutuhkan SDM lokal dengan kompetensi teknis tinggi untuk pengoperasian pabrik

c. Dampak lingkungan

- 1) Mengurangi emisi gas rumah kaca dengan memanfaatkan CO₂ sebagai bahan baku
- 2) Mendukung agenda nasional transisi menuju industri hijau

Proyek ini juga membuka potensi wisata industri edukatif, di mana masyarakat dapat melihat langsung bagaimana konsep industri hijau dijalankan. Eko Satrya menambahkan: "Inilah sisi wisata industri yang ingin kita dorong, di mana pembangunan industri bisa sekaligus menjadi sarana edukasi bagi publik tentang pentingnya efisiensi, tanggung jawab lingkungan, dan inovasi berkelanjutan".

Daftar Pustaka

- BAPPENAS. (2023). Laporan pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2023.
- Rusastra, I. W. (2013). Ekonomi hijau dan agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Seftiani, S. (2023). Praktik ekonomi hijau di Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sutawidjaya, A. H., et al. (2022). Green management strategy in sustainable development (Cet. 1). Universitas Mulawarman Press.
- Volz, U. (2015). Financing the *green* transformation: How to make *green* finance work in Indonesia. Palgrave Macmillan.

PROFIL PENULIS



Dr. Ir. Hardjanto Nusantoro, M.M.

Penulis adalah seorang praktisi dan dosen tetap yang mengajar pada Prodi Manajemen Ritel, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di Universitas Raharja, Tangerang. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1-nya di jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung. Ketertarikan penulis pada bidang manajemen telah mendorong penulis untuk melanjutkan studi S-2-nya pada Program Magister Manajemen, di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Penulis menyelesaikan Pendidikan S-3 nya dalam bidang Administrasi Bisnis, di Universitas Padjadjaran, Bandung.

Sebagai dosen praktisi, penulis mempunyai pengalaman lebih dari 30 tahun menduduki posisi managerial dan *top management* di beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang kimia dan industri manufacturing. Penulis memiliki kepakaran dalam bidang manajemen produksi dan manajemen strategi korporasi, dan pada saat ini penulis tertarik untuk mendalami bidang "*green corporate strategy*".

Sebagai praktisi dalam bidang industri, penulis sadar bahwa suatu industri dalam menjalankan aktivitasnya, selain memberikan manfaat ekonomi, seringkali juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat dan terhadap lingkungannya, jika tidak dikelola secara bertanggung jawab. Untuk itu sangat diperlukan strategi bisnis yang berkelanjutan, melalui implementasi *3P (Profit, People, Planet)* dan *Sustainability* yang mengacu pada standar *ESG (Environmental, Social, Governance)*

Email: hardjanto.nusantoro@raharja.info

BAB 15

**PERUBAHAN IKLIM,
MITIGASI BENCANA,
DAN DAMPAK SOSIO-
EKONOMI DI
INDONESIA**

Dr. Edwin Basmar.
Northern Illinois University – Amerika Serikat



Pendahuluan

Efek perubahan iklim memberikan pengaruh negatif terhadap semua aspek kehidupan manusia bukan hanya lingkungan, melainkan sektor ekonomi juga merasakan dampak perubahan iklim secara signifikan (Basmar, Campbell III, & Fachmi, 2024). Menelusuri awal mula perubahan iklim ini, dikarenakan adanya tekanan keuangan pada penggunaan sumber daya yang berlebihan. Konsep ini secara ekonomi telah terukur dengan jelas pada Teori Klasik yang di pelopori oleh Adam Smith (1723) dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, jelasnya dinyatakan bahwa untuk mencapai kesejahteraan maka konsep *supply* dan *demand* menentukan tingkat harga yang *equilibrium*. Efek ini menyakibatkan kemampuan manusia dalam memenuhi kebutuhannya menjadi semakin optimal (Basmar, 2023).

Dampak yang kurang disadari adalah efek yang dapat mengakibatkan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan produksi semakin berlebihan, sejalan dengan *moral hazard* manusia yang juga meningkat. Sebenarnya teori ini didukung dengan Hukum Say's yang menyatakan bahwa *supply creates its own demand*, yang dipopulerkan oleh Jean-Baptiste Say (1767), menandakan bahwa perubahan iklim terjadi karena tingkat kebutuhan manusia yang semakin banyak dan semakin kompleks dari waktu ke waktu, sehingga dengan bertambahnya kebutuhan tersebut mendorong tingkat produksi semakin meningkat pula.

Walaupun pengukuran perubahan iklim dalam ilmu ekonomi didasari oleh nilai harga, namun ekosistem lingkungan yang tidak terkendali akan mengakibatkan perubahan pergerakan keuangan, dikarenakan dorongan tekanan kebutuhan yang membuat eksploitasi sumber daya alam menjadi berlebihan (Basmar, Campbell III, et al., 2021). Kerusakan akibat perubahan iklim memberikan dampak negatif kepada semua sektor perekonomian, baik secara individu, industri, atau bahkan pemerintah. Kondisi depresi tekanan lingkungan sebagai bentuk identifikasi perubahan iklim terjadi melalui berbagai tanda perubahan alam. Salah satunya adalah melalui kenaikan permukaan laut, panas yang menyengat, perubahan musim

dan kekeringan, serta masih banyak lagi tekanan alam yang dapat menjadi indikator perubahan iklim.

Intensitas tekanan perubahan iklim kemudian harus dapat diantisipasi dengan memberikan ruang kepada lingkungan untuk dapat kembali memberikan ruang hijau kepada manusia. Meski kondisi ini sudah terlambat, namun mitigasi masih lebih baik dari pada merasakan efek tekanan negatif perubahan iklim yang lebih dalam lagi. Efek tekanan secara perlahan namun jelas menunjukkan kerusakan permanen yang tidak dapat dihindari; efeknya akan terasa hingga beberapa tahun yang akan datang.

Nilai tekanan yang terjadi memang tidak sedikit; selain dari kerusakan lingkungan dan keuangan, juga terdapat kerusakan secara sosial seperti peningkatan kemiskinan dan perubahan perilaku manusia melalui migrasi, yang mempengaruhi peningkatan pengangguran serta ketahanan pangan dan berbagai risiko lainnya yang perlu diantisipasi. Oleh karena itu, perilaku ekonomi akan membantu dalam mengurangi efek negatif dari perubahan iklim. Di sektor keuangan, lembaga keuangan dapat memberikan pinjaman *green finance* pada sektor industri sebagai upaya mempertahankan lingkungan dari kerusakan, namun dituntut juga untuk dapat membantu alam dalam memulihkan kondisi alam yang semakin mengalami penurunan kualitas.

Perubahan Iklim dan Stabilitas Keuangan

Ekosistem lingkungan yang tergradasi menjadi permasalahan di Indonesia, namun gejala ini bukan hanya terdapat pada beberapa negara saja, melainkan perubahan ini menjadi permasalahan dunia yang secara ilmiah merupakan gejala kerusakan yang dapat mematikan kehidupan dunia secara perlahan, jika tidak diantisipasi secepat dan sedini mungkin (Basmar, Campbell-III, et al., 2022).

Dalam konteks ekosistem lingkungan, kerusakan ini terjadi karena perilaku manusia tidak menjaga lingkungan dengan baik; salah satunya adalah penggunaan rumah kaca yang mengakibatkan penipisan atmosfer, yang berfungsi menghalangi panas matahari yang masuk ke bumi secara langsung. Kajian literatur menjelaskan bahwa

Daftar Pustaka

- Basmar, E. (2023). Risiko Finansial Teknologi Terhadap Green Finance di Indonesia. *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.46918/point.v5i1.1786>
- Basmar, E., & Baharuddin, G. (2025a). Antitesis Krisis Green Finance Melalui HEXA HELIX + 1 ZAKAT Di Indonesia. *JBR-Jurnal Riset Bisnis*, 9(1), 176–197.
- Basmar, E., & Baharuddin, G. (2025b). Financial Cycle Intensity in the Indonesian Green Finance. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 8(2), 287–303.
- Basmar, E., & Christy, N. N. A. (2025). Green Education Crisis Through Banking Business. *Journal of Education in Specific Purpose Green Education Crisis through Banking Business*, 1(May), 1–18.
- Basmar, E., & S, H. (2021). Literasi Keuangan Dimasa Pandemi Covid 19 (FLC19) dan Pengaruhnya Terhadap Siklus Keuangan Di Indonesia. *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2), 21–33. <https://doi.org/10.46918/point.v3i2.1152>
- Basmar, E., Campbell Iii, C. M., & Basmar, E. (2021). Bank Credit in Financial Cycle in Indonesia. *International Journal of Education and Sositotechnology (IJES)*, 00(00), 0–00. <https://journal.kapin.org/index.php/IJES>
- Basmar, E., Campbell III, C. M., & Basmar, E. (2022). Bank Credit in Financial Cycle during COVID-19 Pandemic: Dilemma from Indonesia. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 7(3), 253–266. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v7i3.484>
- Basmar, E., Campbell III, C., & Changxing, L. (2025). The Green Finance Stress in Indonesian Banking Finance. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 17(1), 79–90.
- Basmar, E., Campbell, C. M., & Fachmi, M. (2024). The Green Economy Crisis Turbulence and the Reaction of Finance Distribution in Indonesian Banking. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(11), 4239–4250. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.191113>
- Basmar, E., Campbell, C. M., Puryandani, S., Basmar, E., Bank BPD

- Jateng, S., Ottow, S., & AMKOP Makassar, S. (2024). The Relationship Between Green Finance and Financial Distress: Empirical Research on Banking in Indonesia. *Journal of Economics and Banking*, Vol 6 No 1(Econbank), 14–28.
- Basmar, E., Campbell-iii, C. M., & Basmar, E. (2022). THE CLIMATE CHANGES IN BANKING CREDIT TO THE FINANCIAL CYCLE DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA. 9(1), 173–182.
- Basmar, E., Iii, C. M. C., & Basmar, E. (2021). Is Indonesia the right investment environment after Covid-19? IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 737(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/737/1/012021>
- Basmar, E., S, H., Campbell III, C. M., & Basmar, E. (2022). Perilaku Kredit Perbankan Dalam Gelombang Siklus Keuangan Selama Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(1), 67–80. <https://doi.org/10.46918/point.v4i1.1400>
- Basmar, E., Salim, Z., Widiastuti, T., & Basmar, E. (2023). Financial Public Turbulency After Covid-19 Pandemic Pressure (CPP 19) : Study Case in Indonesia. 1–14.
- Basmar, E., Sutriana, S., Salim, Z., Basmar, E., & Campbell III, C. M. (2022). Analisis Pergeseran Tekanan Siklus Keuangan di Indonesia. *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(2), 30–45. <https://doi.org/10.46918/point.v4i2.1605>
- Basmar, E., Takhim, M., & Pratiwi, R. (2025). The Finance Circulation Control Through Green Interest Rates in Indonesia. 20(2), 15–23.
- Basmar, E., Takhim, M., Basmar, E., & III, C. M. C. (2023). Shadow Banking Sharia For Financial Cycle Resilience in Indonesia. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 24–34. <https://doi.org/10.31942/akses.v18i1.8594>
- Pratiwi, R., Takhim, M., Wardhani, W. N. R., Ragimun, Sonjaya, A., Rahman, A., Basmar, E., & Pambudi, B. (2024). The Collaboration of Penta Helix to Develop Halal Tourism Villages in Batang, Cental Java. *International Journal of Sustainable Development and*

Planning, 19(7), 2753–2761.
<https://doi.org/10.18280/ijstdp.190732>

Rajab, A., Syafri, M., Ayni Kamaruddin, C., & Basmar, E. (2025). Ekonomi untuk Generasi Z: Melek Uang, Melek Masa Depan. 3(9), 4821–4827.
<https://jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com/index.php/jpmaba/index>

Sonjaya, A., Ragimun, Basmar, E., Ermawati, T., Kurniadi, A. P., Dasilva, H., Sabilla, K., Hasan, Takhim, M., Pratiwi, R., Mutaqin, & Yosepha, S. Y. (2025). How the Integration of Payment Systems Through QRIS Accelerates Economic and Financial Cooperation in the ASEAN Region. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 20(3), 971–980. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.200305>

Takhim, M., Sonjaya, A., Salim, Z., Rahman, A., Basmar, E., Abdullah, R., & Ali, M. (2023). The Synergy of Islamic Banks and Muslim-Friendly Tourism: Patterns of Halal Industry Development in Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(9), 2723–2731. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.180911>

PROFIL PENULIS



Dr. Edwin Basmar

Beliau menyelesaikan studi Visiting Research di Northern Illinois University Amerika Serikat dan Post Doctoral pada National Research and Innovation Agency, Jakarta, setelah Pendidikan Doktoral (Ilmu Ekonomi) di Universitas Hasanuddin, Makassar. Beliau aktif sebagai peneliti di bidang Ekonomi Pembangunan (Makroekonomi,

Keuangan, dan Perbankan). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: e2nbasmar@gmail.com

BAB 16

EVALUASI CAPAIAN

PEMBANGUNAN DAN

PROSPEK STRATEGIS

EKONOMI MASA DEPAN

Zainal Arifin, S.E., M.E.
Universitas Islam Indragiri



Evaluasi Capaian Pembangunan Indonesia

Pembangunan ekonomi Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan berbagai capaian yang signifikan. Salah satu indikator utama keberhasilan tersebut adalah pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, meskipun sempat mengalami perlambatan akibat pandemi COVID-19. Ketahanan ekonomi Indonesia tercermin dari kemampuannya untuk kembali pulih melalui peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, serta berbagai kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif (Unga, Abdullah, & Asrul, 2025). Stabilitas ini menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan investor dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Di sisi kesejahteraan masyarakat, pembangunan telah memberikan dampak positif berupa penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Berbagai program perlindungan sosial, bantuan langsung, peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat telah berkontribusi dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Meskipun tantangan masih ada, capaian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan mulai mampu menjangkau kelompok masyarakat yang rentan.

Keberhasilan pembangunan juga terlihat dari pesatnya pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia. Pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandar udara, bendungan, kawasan industri, serta infrastruktur digital telah meningkatkan konektivitas antardaerah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka peluang investasi baru. Pada saat yang sama, transformasi digital berkembang semakin pesat melalui peningkatan penggunaan internet, perdagangan elektronik (*e-commerce*), layanan keuangan digital (*fintech*), serta digitalisasi pelayanan publik yang mendorong efisiensi dan produktivitas ekonomi (Mardiana, Fahdillah, Kadar, Hassandi, & Mandasari, 2024). Meningkatnya arus investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, menunjukkan semakin besarnya kepercayaan terhadap prospek perekonomian Indonesia. Kebijakan reformasi regulasi, pengembangan kawasan industri, hilirisasi sumber daya alam, serta berbagai insentif investasi telah menjadi faktor pendorong masuknya modal baru. Indonesia juga

memperoleh keuntungan dari bonus demografi, yaitu dominasi penduduk usia produktif yang berpotensi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi apabila didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan vokasi, penguasaan teknologi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Di balik berbagai capaian tersebut, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural yang perlu diselesaikan agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Salah satu tantangan terbesar adalah risiko terjebak dalam *middle-income trap*, yaitu kondisi ketika suatu negara telah mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi mengalami kesulitan untuk bertransformasi menjadi negara berpendapatan tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas, keterbatasan inovasi, serta belum optimalnya penguasaan teknologi dan industri bernilai tambah tinggi. Ketimpangan pembangunan antarwilayah juga masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara beberapa wilayah di luar Jawa menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja. Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga akibat kesenjangan kompetensi, rendahnya tingkat inovasi, dan belum meratanya kualitas pendidikan serta pelatihan vokasi.

Tantangan lainnya berkaitan dengan struktur ekonomi nasional yang masih bergantung pada ekspor komoditas primer sehingga rentan terhadap fluktuasi harga di pasar global. Daya saing industri manufaktur juga masih perlu diperkuat agar mampu menghasilkan produk dengan nilai tambah tinggi dan bersaing di pasar internasional. Dilihat dari sisi lain, isu ketahanan pangan dan ketahanan energi semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan domestik, pertumbuhan jumlah penduduk, serta perubahan dinamika ekonomi global yang memengaruhi stabilitas pasokan dan harga. Pembangunan ekonomi Indonesia juga dihadapkan pada tantangan baru berupa perubahan iklim, ketimpangan digital, dan peningkatan kualitas pendidikan. Perubahan iklim menimbulkan risiko terhadap sektor pertanian, kelautan, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya melalui meningkatnya frekuensi bencana alam serta penurunan

Daftar Pustaka

- Alfidyah, M. (2025). Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap Stabilitas Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 30-37.
- Astuti, F. A. (2021). Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence untuk Penguatan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Sistem Cerdas*, 4(1), 25-34.
- Cahyono, N. F., 'Uyun, K., & Mukaromah, S. (2023). Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan Pada Teknologi Informasi. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Sistem Informasi*, 3(1), 482-491.
- Edelmann, N., & Albrecht, V. (2023). Designing public participation in the digital age: Lessons learned from using the policy cycle in an Austrian case study. *Proceedings of the 24th Annual International Conference on Digital Government Research*, 300-308.
- Mardiana, Fahdillah, Y., Kadar, M., Hassandi, I., & Mandasari. (2024). Implementasi Transformasi Digital dan Kecerdasan Buatan Sebagai Inovasi Untuk UMKM pada Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, 3(1), 266-273.
- Nasution, A. S., Hasibuan, D. N., Dalimunthe, W. M., & Silalahi, P. R. (2023). Peningkatan Kinerja Industri Makanan dan Minuman Melalui Transformasi Digital di Indonesia. *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 1(1), 165-176.
- Nurwahyudi, M., Wendy, Syahputri, A., Azazi, A., & Mustika, U. (2025). Investasi Asing Langsung dan Pertumbuhan Ekonomi di Negara OKI: Peran Moderasi Stabilitas Politik. *MUTIARA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 3(3), 54-72.
- Rochmawati, D. R., Hatimatunnisani, H., & Veranita, M. (2023). Mengembangkan Strategi Bisnis di Era Transformasi Digital. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 14(1).
- Setyasih, E. T. (2022). Transformasi Digital Pemerintah Daerah di Era Society 5.0: Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat. *JURNAL PAPATUNG*, 5(3), 59-66.

PROFIL PENULIS



Zainal Arifin, S.E., M.E.

Penulis adalah akademisi, aktivis masyarakat, dan penggerak pembangunan berkelanjutan. Saat ini ia mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri (UNISI). Dalam kariernya, ia pernah menjabat sebagai Ketua LPPM (2018–2019), Dekan FEB (2019–2023), dan Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan (2023–2024).

Pendidikan tinggi ditempuh di UNISI (S1 MSDM) dan Universitas Trisakti Jakarta (S2 Ilmu Ekonomi). Tahun 2025, ia tengah menyelesaikan studi doctoral di Universitas Jambi (Ilmu Ekonomi) dan Philippine Women's University (*Social Development*). Keahliannya meliputi ekonomi Islam, kewirausahaan, leadership, ekonomi pemandangan, dan pembangunan sosial.

Di luar kampus, Zainal memimpin Yayasan Bangun Desa Payung Negeri (BDPN) yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat, lingkungan, dan pembangunan desa berkelanjutan. Melalui BDPN lahir inisiatif rakyat seperti GREENOMOS, KAWAN PESISIR, dan AKAR RIAU. Sebagai putra Indragiri Hilir, ia dikenal sebagai penggerak akar rumput yang aktif memberdayakan nelayan, petani, dan komunitas lokal, dengan fokus pada pembangunan desa serta pelestarian mangrove.

E-mail Penulis: zainalbdpn@gmail.com



EKONOMI PEMBANGUNAN INDONESIA

TEORI, KEBIJAKAN KONTEMPORER, DAN
TANTANGAN STRUKTURAL

Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika pembangunan ekonomi di Indonesia, yang hingga kini masih menjadi salah satu agenda paling menantang sekaligus paling fundamental bagi kelangsungan bangsa. Pembangunan ekonomi Indonesia bukanlah sekadar soal angka pertumbuhan atau capaian makroekonomi semata. Lebih dari itu, ia menyangkut transformasi struktural, keadilan sosial, dan kedaulatan ekonomi. Seperti yang telah lama diingatkan oleh para pemikir ekonomi nasional, pembangunan yang kokoh hanya dapat tegak jika industrialisasi diletakkan sebagai pilar utama penciptaan nilai tambah, dan negara hadir sebagai pengarah strategi ekonomi yang berkeadilan. Di tengah gejolak global, ketergantungan pada ekspor komoditas dan utang luar negeri masih membayangi, sementara hilirisasi dan penguatan pasar domestik menjadi keniscayaan yang tak terelakkan. Buku ini disusun dengan maksud untuk menjadi bahan bacaan dan rujukan bagi mahasiswa, akademisi, serta para pengambil kebijakan yang ingin mendalami ilmu ekonomi pembangunan, khususnya dalam konteks kekinian Indonesia. Materi dalam buku ini dirancang untuk mengantarkan pembaca memahami:

1. Paradigma Teori Ekonomi Pembangunan dan Relevansinya di Indonesia
2. Sejarah dan Evolusi Struktur Ekonomi Indonesia dari Masa ke Masa
3. Teori Dualisme Ekonomi dan Karakteristik Negara Berkembang dalam Konteks Nasional
4. Perencanaan Pembangunan Nasional: Sistem, Dokumen, dan Model Kelembagaan
5. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Faktor Pendorong dan Jebakan Pendapatan Menengah (Middle-Income Trap)
6. Ketimpangan Pendapatan, Koefisien Gini, dan Strategi Pertumbuhan Inklusif
7. Dinamika Ketenagakerjaan, Pengangguran Struktural, dan Bonus Demografi
8. Sektor Jasa, UMKM, dan Perannya sebagai Penopang Ekonomi Domestik
9. Dampak Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah terhadap Pemerataan Pembangunan
10. Pembangunan Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan
11. Kebijakan Fiskal Nasional: Optimasi Pajak, Pengelolaan Utang, dan Alokasi APBN
12. Ekonomi Sumber Daya Alam, Kutukan Sumber Daya (Resource Curse), dan Ketahanan Energi
13. Transformasi Ekonomi Digital: E-Commerce, Fintech, dan Kesiapan Tenaga Kerja Era 4.0
14. Ekonomi Hijau (Green Economy) dan Strategi Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
15. Perubahan Iklim, Mitigasi Bencana, dan Dampak Sosio-Ekonomi di Indonesia
16. Evaluasi Capaian Pembangunan dan Prospek Strategis Ekonomi Masa Depan